

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram  
Lampung Tengah)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**SUCI WULANDARI**

NPM. 1351010044

Program Studi : Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram  
Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**SUCI WULANDARI**

NPM. 1351010044

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Prof.Dr. Tulus Suryanto. M.M.Akt.CA

Pembimbing II : M. Kurniawan, S.E.I, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Maka rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan dan apa saja faktor pendorong, penghambat ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Rejosari Mataram dan bagaimana pengelolaan ADD dalam perspektif ekonomi Islam?, Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Rejosari Mataram dalam perspektif ekonomi Islam. Kegunaan penelitian agar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan yang di ambil dan sebagai pedoman program ADD.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah aperatur desa dan tokoh masyarakat di Desa Rejosari Mataram, dengan menggunakan metode *perposive sampling*. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisa model *Miles dan Huberman* dengan metode berfikir deduktif.

Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD 2016 - 2017 di Desa Rejosari Mataram sudah menggunakan asas adil dan merata di beberapa desanya yaitu Desa Rejo Katon dan Rejo Makmur. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD 2016 - 2017 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena ADD yang sangat minim sehingga komposisi pembagiannya dirasakan kurang untuk masing-masing kegiatan seperti masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan belum terprogram karena aperatur desa dan tokoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan jalan yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan yang sudah dilaksanakan dari ADD tahun 2016-2017 di Desa Rejosari Mataram yaitu pembangunan jalan, gorong-gorong, jembatan, pembangunan sinitasi air bersih dan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

**Kata Kunci : ADD, Kesejahteraan, dan Ekonomi Islam**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jln. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Telpn: 0721-704030 Sukarame 1 Bandar Lampung 35131

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Di Desa Rejosari Mataram , Kec.Seputih Mataram , Lampung Tengah )  
**Nama** : Suci Wulandari  
**NPM** : 1351010044  
**Jurusan** : Ekonomi Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Prof.Dr.Tulus Suryanto. M.M.Akt.CA**

**NIP. 19700926 200801 1 008**

**Pembimbing II**

**M. Kurniawan,S.E.I, M.Si**

**NIP.19860517 201503 2 004**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Mudnasir,S.E,M.Si**

**NIP.19750424 200212 1 001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jln. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Telpn: 0721-704030 Sukarame 1 Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSEPEKTIF  
EKONOMI ISLAM (DI DESA REJOSARI MATARAM , KEC.SEPUTIH  
MATARAM , LAMPUNG TENGAH)**" disusun oleh Suci Wulandari NPM.

1351010044 Jurusan Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah ,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 18 Desember 2018

**TIM DEWAN PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Ruslan Abdul Ghofur,M.S.I** (.....)

**Sekretaris : Diah Mukminatul M.E.Sy.** (.....)

**Penguji I : Femei Purnamasari, SE., M.Si** (.....)

**Penguji II : Prof. Tulus Suryanto,M.M.,Akt.,C.A.** (.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Moh. Bahrudin M.Ag**

**NIP.19580824 198903 1 003**

## OTTOM

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa:58) ”*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat saya cintai, yaitu:

1. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Ahmad makmuri dan Ibu Siti komariyah yang selama ini dan untuk selamanya selalu mencintaiku, menyayangiku, mendoakanku, yang selalu berkorban untuk ku tidak peduli siang maupun malam, sebesar apapun kesuksesan anakmu nanti sebesar apapun bakti anakmu tidak akan mampu dan tidak akan pernah menggantikan kasih sayang dan pengorbanan bapak dan ibu kepada kami. Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT, diberi keberkahan dalam setiap langkahnya, selalu dilimpahkan kebahagiaan dan diberikan umur yang panjang. Amin.
2. Saudaraku, Angga apriliawan dan Andika ahmad fadli Karena Berkat doa, dukungan dan semangat darinya, anak nakal ini dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang tepat.
3. Untuk teman terbaikku yang selalu memberi dukungan dan slalu menyemangatiku riadi eko herwanto terimakasih.
4. Untuk teman sekaligus saudara mb eka dan mas andra terimakasih banyak.
5. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu-ilmu yang Rabbani, UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.
6. Sahabat seperjuangan Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dengan pancaran nilai-nilai Rabbani.

## **RIWAYAT HIDUP**

Suci wulandari lahir pada tanggal 30 juli 1995, di Desa yukum jaya, Kecamatan terbanggi besar, Kabupaten Lampung tengah, sebagai anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad makmuri dan Ibu Siti komariyah.

Adapun pendidikan yang penulis tempuh yaitu:

1. Tk Aiisyyah bustanul athfal (ABA) yukum jaya, kecamatan terbanggi besar, lampung tengah tahun 2000
2. Sekolah Dasar Negeri 1 yukum jaya, Kecamatan terbanggi besar Kabupaten Lampung tengah pada tahun 2001-2007.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 terbanggi besar , Kabupaten Lampung tengah pada tahun 2007-2010.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 terbanggi besar, Kabupaten Lampung tengah pada tahun 2010-2013.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Prodi Ekonomi Syari'ah pada tahun 2013-2018.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, rezeki dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul "Analisis pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam persepektif ekonomi islam" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Islam. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Moh. Bahrudin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1, 2 dan 3.
3. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Prof. Dr Tulus suryanto,M,M,Akt,Ca selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Kurniawan, SE, M.E.Sy selaku pembimbing kedua yang telah mengarahkan penulis sehingga terselesainya skripsi ini, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.

6. Seluruh petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Seluruh jajaran pegawai/karyawan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data guna terselesaikan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan Prodi Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 khususnya kelas F yang selalu bersama dalam proses belajar, mengerjakan tugas, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan UTS dan UAS hingga proses skripsi.
9. Sahabatku, Annisa Yulianti, euis laili hardianti nuryuliana, arlita trisdayani putri, riana nur hidayah, imam rifai, riko setiawan, richat fernando Ami Ade Maesyarrah, , annisa inayatul aini Gusti Ratna Ningsih, , Nisvia Eryani, Rhosa Gustina, , veti andriani, weny shofura, Yunita, Wahyuni Andrefa dan sahabat-sahabat KKN desa rejosari matarm Kecamatan Seputih mataram Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016, dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Yang telah memberikan support bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang kita raih bersama-sama bermanfaat dan berkah dunia akhirat.
10. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang khazanah Ekonomi Syari'ah.

Bandar Lampung, januari 2019  
Penulis

Suci wulandari  
NPM. 1351010044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>V</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Batasan Masalah.....	12
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	12
G. Ruang Lingkup Penelitian .....	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Tinjauan Pustaka .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>26</b>
A. Ekonomi .....	26
1. Pengertian Ekonomi .....	26
2. Pengertian Sistem Ekonomi .....	26
3. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi .....	27
4. Kebijakan Ekonomi.....	28
B. Belanja Negara .....	30
1. Dana Perimbangan (Dau dan Bagi Hasil) .....	30
2. Program Alokasi Dana Desa .....	34
3. Alokasi Dana Desa .....	40



C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat .....	45
1. Pengertian Kesejahteraan .....	45
2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	46
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	48
4. Faktor Pendorong Pelaksanaan Program ADD .....	54
5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program ADD .....	56
6. Kiat-Kiat mencapai Kesejahteraan .....	57
D. Ekonomi Islam .....	58
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	58
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam .....	60
3. Pengertian Sistem Ekonomi Islam .....	61
4. Nilai-Nilai Dalam Sistem Ekonomi Islam .....	63
5. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam .....	66
E. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam.....	69
1. Pengertian Kesejahteraan (Falah) Dalam Ekonomi Islam .....	69
2. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam .....	74
<b>BAB III PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>80</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	80
1. Sejarah Singkat Desa Rejosari Mataram.....	80
2. Kondisi Geografis Desa Rejosari Mataram.....	81
3. Kondisi Demografis Desa Rejosari Mataram.....	81
4. Struktur Organisasi Pemerintahan.....	87
5. Kondisi Masyarakat di Desa Rejosari Mataram.....	89
B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rejosari Mataram.....	96
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>107</b>
A. Analisis Penggunaan ADD T.A 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .....	107
B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan ADD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .....	123
C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rejosari Mataram Menurut Persepektif Ekonomi Islam .....	127

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>129</b>
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Populasi Penelitian .....	17
Tabel 1.2 Kompenen dalam Analisis Data.....	23
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk .....	82
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	82
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	83
Tabel 3.4 Fasilitas Tempat Ibadah .....	83
Tabel 3.5 Fasilitas Pendidikan .....	84
Tabel 3.6 Sarana Kesehatan .....	84
Tabel 3.7 Kondisi Perumahan.....	85
Tabel 3.8 Pekerjaan .....	87
Tabel 3.9 Struktur Pemerintahan.....	88
Tabel 3.10 Tingkat Pendidikan .....	90
Tabel 3.11 Tingkat Kesehatan.....	91
Tabel 3.12 Jenis Profesi dan Jumlah Pendapatan .....	93
Tabel 3.13 Pola Konsumsi Masyarakat .....	94
Tabel 3.14 Tingkat Perumahan Masyarakat.....	96
Tabel 3.15 Penyaluran ADD Tahun 2016.....	98
Tabel 3.16 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung.....	98
Tabel 3.17 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung .....	99
Tabel 3.18 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	99
Tabel 3.19 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	100
Tabel 3.20 Penyaluran ADD Tahun 2017 .....	100
Tabel 3.21 Data Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung .....	101
Tabel 3.22 Bidang Pembangunan .....	101
Tabel 3.23 Bidang Pembinaan Masyarakat.....	102
Tabel 3.24 Pemberdayaan Masyarakat .....	102
Tabel 3.25 Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ternak Sapi.....	103
Tabel 3.26 Pemberdayaan Masyarakat Usaha Sale Pisang.....	104



Tabel 4.1 Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ternak Sapi .....	110
Tabel 4.2 Pemberdayaan Masyarakat Usaha Sale Pisang.....	111
Tabel 4.3 Indikator Kesejahteraan Sebelum dan Sesudah ada ADD .....	117

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Aparatur Desa dan Warga

Lampiran 2 Dokumentasi Usaha Sale Pisang Warga

Lampiran 3 Dokumentasi Usaha Ternak Sapi Warga

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka adanya pemahaman menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini adalah **“Analisis pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam persepektif ekonomi islam” (di Desa Rejosari Mataram, Kec. Seputih Mataram, Lampung Tengah).**

Adapun istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Analisis

adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

##### 2. Pengelolaan

Adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumberdaya yang di perlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu(prajudi atmosudirdjo,1982)

##### 3. Alokasi dana desa

adalah proses, cara, perbuatan mengalokasikan. anggaran keuangan yang di berikan pemerintah kepada desa yang mana hasilnya bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta hasil dana perimbangan keuangan pusat dan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008 ), h. 58.



daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).<sup>2</sup>

#### 4. Kesejahteraan Masyarakat

adalah salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>3</sup>

#### 5. Perspektif

Adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.<sup>4</sup>

#### 6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan prinsip-prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggung jawaban, dan juga takaful (jaminan social).<sup>5</sup>

### B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Alasan objektif :

Dengan meneliti tentang alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dapat di ketahui apakah alokasi dana desa terhadap

---

<sup>2</sup>Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No.4, Hal. 597-602| 598

<sup>3</sup> RudiBadrudin, *EkonomiOtonomiDaerah*, ( Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2012), h. 145.

<sup>4</sup>DediSupriadi, *EkonomiMikro Islam* (Bandung:PustakaSeti,2013),h.249

<sup>5</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2013), h. 62-63.

kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memajukan kesejahteraan Desa Rejosari Seputih Mataram.

## 2. Alasan subjektif

Dari aspek yang penulis bahas, permasalahan dalam skripsi ini sangat memungkinkan diadakan penelitian mengingat literatur dan bahan data informasi yang di perlukan sangat menunjang, banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan di teliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepanya. Selain itu judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar belakang masalah

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak - banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan apapun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan di bidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional rill dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

---

<sup>6</sup>LoncolinArsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 31.

Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan<sup>7</sup>. Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.<sup>8</sup>

Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol ‘‘Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)’’. Pada masa orde baru

---

<sup>7</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika, 1999) h. 14.

<sup>8</sup>Kansil dan Cristine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 3.

secara substensial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*, pada era reformasi secara substensial pembangunan desa lebih kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantara Program Inpres Desa Tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat *botten-up* atau kombinasi *top-down* dan *botten-up*. Program pembangunan desa yang bersifat *botten-up* tertuang dalam undang-undang Otonomi Daerah (OTDA).<sup>9</sup>

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang di tetapkan dalam

---

<sup>9</sup> 9osnawati, *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanandam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar*, (Lampung: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 30.

Undang-undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan pada potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaitu desa.<sup>10</sup>

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang Desa pasal 68 ayat (1) poin c dinyatakan bahwa tujuan dari alokasi dana desa ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

---

<sup>10</sup> AkbarPrabawa, "PengelolaanAlokasiDanaDesaDalamPembangunan di desa LoaLepuKecamatanTenggarongSeberangKabupatenKutaiKartanegara". *JurnalIlmuPemerintah*, Vol. 3 No. 228 (Desember 2015).

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Berdasarkan tujuan alokasi dana desa diatas, salah satunya pemerintah mengharapkan dengan adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan

dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode *analisis Milles dan Huberman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD belum sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Dalam teori pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain.

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek–aspek dan segi kehidupan



masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jalan merupakan suatu lintasan yang berhubungan suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah sebabnya jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat disuatu tempat untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.

Di dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa rejo sari, kec.seputih mataram, lampung tengah. Terdiri dari 9(sembilan) dusun yaitu : Rejo Katon, Rejo Basuki, Rejo Mukti, Rejo Agung, Rejo Murni, Rejo Mulyo, Rejo Binangun, Rejo Asri. Yang berjumlah 1755kk (kepala keluarga).kondisi perekonomian di desa rejo sari seputih mataram di dominasi pada sektor pertanian = 92,5%, buruh tidak tetap = 3%, PNS = 1%, karyawan = 1%, buruh perusahaan = 1%, pedagang = 1%, wiraswasta = 0,1%. Di kecamatan seputih mataram ini mengalokasikan dana ke setiap desanya pada tahun 2017 bekisar antara Rp.135.000.000( seratus tiga puluh lima juta rupiah) s/d Rp.140.000.000(seratus empat puluh juta rupiah) pertahun sudah termasuk anggaran aparatur desa<sup>11</sup>.

Dengan di terbitkannya uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu prioritaskan kebutuhan masyarakat di bandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang

---

<sup>11</sup>Maryono (Sekertaris Camat), WawancaradenganPenulis,seputih mataram, 11 januari 2018.

lebih luas dan rumit. untuk itu pembangunan pedesaan yang di laksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi. Serta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang di perlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang di miliki. Serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai mana firman allah swt dalam surat (qs ar-ra'd:11)

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>12</sup>

Allah memiliki malaikat yang datang secara bergantian kepada manusia, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang menjaganya dari perintah Allah dan menghitung apa-apa yang berasal darinya;kebaikan maupun keburukan.Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum, kecuali apabila mereka sendiri yang merubah apa yang Dia perintahkan kepada mereka, lalu mereka berbuat maksiat

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Jamanatul „AliAl-Qur“andanTerjemahannya*, (Bandung: CvPenerbit J-ART, 2004), h. 350.

kepadaNya. Dan apabila Allah ingin menimpakan malapetaka kepada suatu kelompok, maka tidak jalan untuk menghindarinya, dan tidak ada penolong bagi mereka selain Allah yang akan menangani urusan mereka, yang akan mendatangkan apa-apa yang mereka cintai dan menolak Dari mereka apa-apa yang tidak mereka sukai.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa rejosari, kec.seputih mataram lampung tengah. Bagaimana dampak pelaksanaan program alokasi dana desa tahun 2017 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di rejosari, kec.seputih mataram, lampung tengah. Serta bagaimana pelaksanaan serta dampak program ADD 2017 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam persepektif ekonomi islam.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam (di Desa Rejosari Mataram , Kec.Seputih Mataram , Lampung Tengah )**

---

<sup>13</sup> <https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11.html>

#### **D. Batasan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dalam program ADD ini.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang tertulis di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rejosari Seputih Mataram Dalam Persepektif Ekonomi Islam ?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
3. Bagaimana pengelolaan ADD dalam persepektif Ekonomi Islam ?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa 2017 terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Rejosari Seputih Mataram.
- b. Untuk mengetahui kendala dari pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam persepektif Ekonomi Islam

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui pemecahan masalah maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi islam secara khususnya:

- 1) memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi islam.
- 2) dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan program alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan seputih mataram.
- 2) Bagi Aperatur Desa: dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program alokasi dana desa.
- 3) Bagi Mahasiswa: dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M. AhmadAnwar, *Prinsip-PrinsipMetodelogi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975) h. 2.

## **G. Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup masalah merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan selanjutnya. Agar pembahasan masalah lebih terarah maka penulis memberikan batasan pada penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut adalah :

1. Pada penelitian ini hanya membahas masalah – masalah yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam persepektif ekonomi islam.
2. Faktor – faktor yang di bahas hanya seberapa besar pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, bagaimana faktor pendorong dan peng hambat pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi tidak dibahas karena akan terlalu luas.

## **H. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Mardalis, *Suatu Pendekatan Proposal*, cetakan ke X, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 28.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dalam usaha mencari kebenarannya peneliti ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang tidak langsung berwujud angka, tetapi dalam bentuk konsep ataupun pengertian abstrak. Dalam hal ini data yang akan di gunakan sebagai alat analisis adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan program alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana menurut M.Nazir metode deskriptif itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, atau suatu peristiwa pada masasekarang. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, menegaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang gejala atau keadaan.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>16</sup>Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 131.



- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.<sup>17</sup>Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan pertanyaan kepada masyarakat ataupun aparat desa yang terkait tentang pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifat saling melengkapi. Data sekunder berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literature yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisis secara tepat.<sup>18</sup>
3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>19</sup>Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terkait.

---

<sup>17</sup>Winarnosurakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 134

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 135

<sup>19</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ALFABETA, Bandung, 2014, hlm. 80

**Tabel 1.1**  
Jumlah populasi penelitian

No	Desa	Jumlah Aparatur Desa	Jumlah Tokoh Masyarakat	Masyarakat yang Terkait
1	Rejo Katon	4	8	2
2	Rejo Basuki	5	10	3
3	Rejo Mukti	4	7	3
4	Rejo Agung	5	10	2
5	Rejo Murni	4	8	2
6	Rejo Mulyo	4	10	2
7	Rejo Binangun	3	8	2
8	Rejo Asri	5	10	3
9	Rejo Makmur	5	5	3
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>76</b>	<b>22</b>

Sumber: Data Primer Di Olah Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah populasi ini terdiri dari aparaturnya desa 39, tokoh masyarakat 76, masyarakat yang terkait 22, jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 137.

**b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>20</sup> Pengambilan sampel berjumlah 137 orang responden atas pertimbangan jumlah tersebut cukup dengan tingkat *sampling error* sebesar 15% dan tingkat kepercayaan sebesar 85% (Bungin, 2001, p.129). Pengambilan sampel tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Husein Umar (2003, p.59). Beliau

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 81

mengemukakan bahwa untuk menghitung besarnya ukuran sampel dapat dilakukan dengan menggunakan teknik slovin yaitu dengan rumus<sup>21</sup> :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = Anggota/unit sampel

N = Jumlah populasi

e = error yang ditoleransi (0.15 atau 15%)

Berdasarkan teknik Slovin, maka ukuran sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{137}{1 + 137 \times (0.15)^2}$$

$$n = 33,557$$

Setelah melihat hasil perhitungan dari pengambilan sampel, penulis menetapkan pengambilan sampel 34 responden. oleh sebab itu, untuk mendapatkan data yang akurat disini menggunakan wawancara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

##### a. Metode observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di

---

<sup>21</sup>Johan Santos dan Nugroho Alamjaya Sutjipto, *Persepsi Terhadap Membership Card Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen Di Narita Hotel Surabaya*. *Jurnal Manajemen Perhotelan*, Vol. 1, No 1, 2013, hlm 6.

selidiki<sup>22</sup>. Dalam observasi penelitian menggunakan jenis observasi non partifasi, dalam observasi ini pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang di observasi. Penelitian hanya menggunakan data-data yang sudah ada di wilayah kecamatan seputih mataram.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.<sup>23</sup>

*Interview* sebagai suatu proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadap secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, merupakan alat mengumpulkan informasi langsung untuk berbagai jenis data data sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang *memanifes*.<sup>24</sup>

Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dan bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana *interview* tidak secara langsung mengarahkan Tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian.<sup>25</sup> Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti

---

<sup>22</sup> I Gusti Rai Utama dan Bi Made Eka Mahadewi, *Metodelogi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, adisi 1,2015), h. 52.

<sup>23</sup> Nasutrion, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 115.

<sup>24</sup> SutrisnoHadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi, 1989), h. 217.

<sup>25</sup> Nasution, *MetodelogiPenelitainPariwisataDanPerhotelan*, h. 64.

situasi.<sup>26</sup> Penentuan sumber data kepada orang yang di wawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu kepada orang-orang yang dipandang tahu situasi sosial tersebut.<sup>27</sup>

Penulis menggunakan metode ini sebagai pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar desa rejosari mataram.

#### c. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui peninggalan penulis melalui beberapa arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang teori pendapat, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>28</sup>

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang penelitian ini berupa data masyarakat aparaturnya dan pihak yang terkait.

### 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan penelitian, data yang telah terkumpul akan dianalisis sebagaimana data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan langkah-langkah sebagaimana berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 65.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Op.Cit.* h. 216

<sup>28</sup> Suharsim Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2002), h. 20.

a. Editing

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Klasifikasi

Adalah memberikan penafsiran terhadap hasil presentase yang di peroleh sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

c. Interpretasi

Adalah memberikan penafsiran terhadap hasil presentase yang di peroleh sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.<sup>29</sup>

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dibedakan menjadi dua macam yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan peneliti.

Analisis ini dilakukan dengan tujuan menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah untuk dibaca atau diinterpretasikan. Data yang dikelompokkan dan diadakan kategori serta dilakukan klasifikasi

---

<sup>29</sup>Moersalah, Musanef, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta : Gunung Agung, 1981), h. 17.

sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.

Metode pengelolaan dan analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk variable dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik, dalam penelitian kualitatif, langkah penelitian baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai.<sup>30</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>31</sup>

Analisis data lapangan ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*.

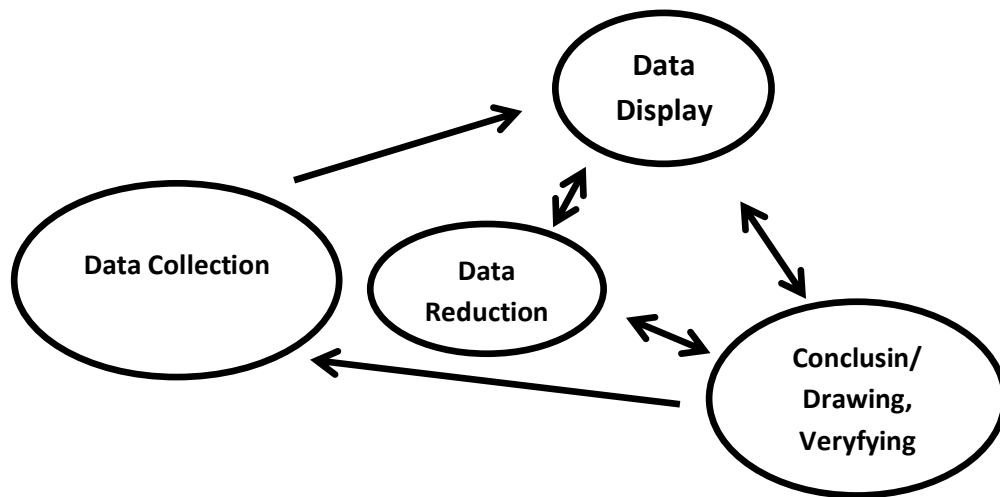
---

<sup>30</sup>*Ibid.* h. 75.

<sup>31</sup>Sugiyono, *Op.Cit*, h. 2.



Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar 1.2 <sup>32</sup>:



**Tabel 1.2 Komponen dalam Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 246.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 42.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan pendekatan kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>34</sup> Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari masyarakat di setiap desa yang ada di Kecamatan rejosari mataram dengan aparat desa yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari data dan teori yang ada tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu analisis pengelolaan alokasi dana desa 2017 dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

## **I. Tinjauan Pustaka**

Karya ilmiah dengan tema ADD dan kesejahteraan ada beberapa penulis temukan, diantaranya:

1. Skripsi dengan judul Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar, Karya Rosinawati, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun, 2015. Dimana focus kajiannya pada masalah bagaimana dampak positif dan negatif ADD terhadap kesejahteraan pada Kecamatan Negeri Besar.
2. Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: PP RI Nomor 22 tahun 2015, PMK RI Nomor 93 tahun 2015, PP RI nomor 45 tahun 2015, SKB 3 menteri Tahun 2015, fokus kajian penelitian ini adalah

---

<sup>34</sup>Kartino Kartono, *Op.Cit.* h. 352.

kurangnya pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa. Karya A. Saibani.

3. Buku Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, strategi, dan peluang karya Muderajad Koncoro. Ph.D., (Erlangga, Jakarta, 2004) fokus kajian yaitu pada permasalahan perencanaan daerah di era otonomi, strategi pembangunan daerah, dan peluang pembangunan bisnis daerah.
4. Tesis dengan judul” analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa karang luhur kabupaten wonosobo ‘’,karya,FeniYudantiPrasetyaningtyas, Susi Sulandari Depertemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
5. Jurnal dengan judul ‘’pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan (StudiKasus :Desa Segodorejo dan DesaPlosoKerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)’’ karya okta rosalinda 2014

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Ekonomi**

##### **1. Pengertian Ekonomi**

Menurut M. Manulang, Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa)<sup>1</sup>. Ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumberdaya yang langka (dengan dan tanpa uang), dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>2</sup> Jadi ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan meningkatkan kualitas hidupnya.

##### **2. Pengertian Sistem Ekonomi**

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi menurut Kyoto Sherdan sebagai organisasi sosial yang terdapat di dalamnya (individu, kelompok pemerintah swasta dan lain sebagainya) yang bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagiaan. Menurut John F. Due sistem ekonomi merupakan seluruh pranata (lembaga) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bukan satu lembaga atau instansi secara khusus. Suatu sistem

---

<sup>1</sup>Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian teoritis dan Analisis Empiris*, (Bogor: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2013), h. 4.

<sup>2</sup>Pratama Rahardja, *et.al.*, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 3

akan memengaruhi pola berfikir dan bertindak masyarakat yang ada dalam sistem tersebut dan akan menjadi norma di masyarakat<sup>3</sup>.

Lebih jelasnya sistem ekonomi diartikan sebagai cara sesuatu ekonomi disusun, dikawal dan dilaksanakan, merupakan bagian dari sistem sosial yang antara keduanya tidak bisa dipisahkan secara sembarangan. Sedangkan instansi (lembaga) dalam suatu sistem adalah organisasi baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin maupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Dengan demikian sistem ekonomi dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang menetap dan teratur. Dalam sistem ekonomi, dibahas pula mengenai persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional.

### **3. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi**

Setiap sistem ekonomi didasarkan pada ideologi tertentu yang secara langsung menggariskan prinsip-prinsip ekonomi, memberikan landasan dan tujuan dalam berekonomi. Prinsip dalam sistem ekonomi sangat ditentukan oleh pandangan hidup yang dianut, ini tidak lain agar tujuan sistem dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebagaimana prinsip dalam sistem ekonomi kapitalis, yang menjadikan kepemilikan kapital dan mekanisme pasar sebagai unsur utama dalam aktivitas ekonominya dapat berkembang pada masyarakat yang berpaham liberalis.

---

<sup>3</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 51.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 52.

Begitu juga pada sistem sosialis yang menjadikan kolektivitas serta mengabaikan kepemilikan individu sebagai prinsip, dapat berkembang pada masyarakat yang berpaham sosialis-komunis.

Selain prinsip dalam sistem ekonomi, tujuan sistem ekonomi juga sangat ditentukan oleh bagaimana satu sistem tersebut memandang dunia. Jika dipandang dari suatu sistem ekonomi bahwa dunia disediakan untuk sepenuhnya kepentingan manusia tanpa ada batasan-batasan norma, maka tujuan yang terbentuk hanyalah untuk kepuasan maksimum sebagaimana yang terdapat pada ekonomi kapitalis.

Hal ini berbeda dengan apa yang ada pada sistem ekonomi islam, yang memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki oleh ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya-sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.<sup>5</sup>

#### **4. Kebijakan Ekonomi**

Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi (*economic policy*), yaitu cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Masalah konkret yang dihadapi dalam politik ekonomi

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 53

ialah bahwa tujuan-tujuan tersebut belum tentu dapat dicapai bersama-sama. Sebab kerap kali usaha untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa sedikit banyak harus mengorbankan tujuan yang lain. Misalnya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan diperlukan investasi dalam jumlah yang besar.

Tetapi investasi besar-besaran mudah menimbulkan inflasi dan memberatkan Neraca Pembayaran karena memperbesar impor. Demikian pula usaha menstabilkan harga beras sering bertolak belakang dengan usaha memajukan sektor pertanian dan pemerataan pendapatan bagi petani. Untuk menjawab tantangan itu memang diperlukan kebijaksanaan. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus bekerja sama dengan instansi lain/ yang terkait karena kebijakan yang diambil biasanya akan berimbas pada instansi lain. Kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan antara lain menaikkan tariff bea import bagi barang-barang yang di negara kita sudah ada sehingga masyarakat akan lebih memilih produk kita, memberikan bantuan modal untuk produk yang mempunyai keunggulan komparatif dengan bunga ringan dan jangka waktu panjang sehingga produk tersebut dapat masuk di pasar dunia. Dalam hal ini pemerintah dapat bekerja sama dengan bank, depnaker, dinas pajak dan lain-lain.

Jadi, kebijakan ekonomi adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti kebijakan pemerintah untuk kepentingan public misalnya, meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan transportasi, komunikasi, pertahanan



kemanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air rsih,listrik).Begitu juga dengan kebijakan social merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga Negara melalui penyediaan pelayanan social atau bantuan keuangan.Kebijakan ekonomi yang masuk kedalam kebijakan sosial, sangat terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

## **B. Belanja Negara**

### **1. Dana Perimbangan (DAU dan Bagi Hasil)**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

#### **A. Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh

---

<sup>6</sup>*Ibid.* h. 54.

Pasal 21). Yang dimaksud dengan PPh WPOPND adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk Pemerintah (Pusat) dan 90% untuk daerah.

#### **B. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% dan 90%.

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Menteri Keuangan kemudian melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD dimaksud. Formula dan perhitungan DAU disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka data yang digunakan adalah data dasar penghitungan DAU tahun sebelumnya.

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi. Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh provinsi. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota.

Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing

bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita. Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH.

Kondisi penerimaan DAU berdasarkan nilai celah fiskal:

- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar.
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.
- DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data celah fiskal dan alokasi dasar untuk daerah baru tersebut.
- Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk. Dalam hal ini, penghitungan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.

Kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan dialokasikan sebagai DAU tambahan. DAU tambahan dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas dasar celah fiskal. Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara penyaluran DAU dan DAU tambahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Transfer dana perimbangan ke daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian, transfer kedaerah ditetapkan dalam APBN, peraturan presiden, dan peraturan menteri keuangan (PMK) yang selanjutnya di tuangkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh direktorat jendral perimbangan keuangan selaku kuasa pengguna anggaran atas nama menteri keuangan selaku pengguna anggaran untuk tiap jenis transfer ke daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah.

## **2. Program Alokasi Dana Desa (ADD)**

Program/perencanaan (*planning*) yaitu fungsi dasar (*Fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun Harus

terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis, perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan di ketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah “memilih”. Artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan.<sup>7</sup> Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat Kunarjo program didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek.

Sementara itu menurut Jones program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumber-sumber daya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern. Perencanaan menurut Williams, perencanaan adalah proses untuk mengantisipasi dan mengubah sesuatu yang belum terjadi, melihat jauh ke depan, mencari solusi yang optimal, yang dirancang untuk meningkatkan dan idealnya memaksimalkan manfaat pembangunan secara pasti dan yang akan menghasilkan hasil yang diprediksi.

---

<sup>7</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 91.

Namun kita sebagai umat muslim memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan daripada pendapat pakar perencanaan tersebut. Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitupun dengan perencanaan<sup>8</sup>.

Sebagaimana Allah berfirman dalam dalam (QS. AL-an'am, 38):

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي  
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

*38. Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan..*<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut dapat kita ambil makna yang tersirat, bahwasannya setiap makhluk hidup memiliki aktivitasnya masing-masing, dan setiap aktivitas tersebut akan dicatat dalam kitab amal perbuatan. Dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar akan dicatat secara rinci dan detail oleh Malaikat. Dan kelak buku amalan tersebut akan menjadi saksi di Yaumul Hisab. Untuk itu perlu adanya perencanaan dalam melakukan suatu aktivitas, karena manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia memiliki

<sup>8</sup> Abu UsamahAbdurrahmah, "PerencanaanDalamKaidah Islam" (On-line), tersedia di: <https://islamisone.wordpress.com/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-islam/> (14 Juni 2017).

<sup>9</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Jamanatul „AliAl-Qur“andanTerjemahannya*, (Bandung: CvPenerbit J-ART, 2004), h. 350.

aktivitas yang dinamis, berbeda dengan tumbuhan dan hewan. Karena manusia dibekali oleh akal pikiran, hal ini merupakan faktor yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya di alam dunia.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia dan menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu:

- (1) Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur;
- (2) Program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran;
- (3) Program dapat dihitung secara analisis cost benefit. Jadi kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat diukur outputnya. Selain dari pada itu program sendiri terdiri dari berbagai macam, menurut Munir, bahwa program tidak hanya mencakup pada bidang yang luas tetapi juga ruang lingkup, isi, durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksitas tujuan dan kebaruan program yang bermacam-macam :

a. Ruang lingkup

Program kemungkinan memiliki lingkup, daerah, kota, kelompok, atau terbatas pada tempat dan kelompok tertentu. Beberapa program mungkin terpecah pada beberapa tempat dengan perhatian pada suatu hal tertentu.



b. Ukuran (*Size*)

Program dapat melayani sedikit atau ratusan atau mungkin ribuan bahkan jutaan orang.

c. Durasi

Program dapat berlaku dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun atau mungkin tidak terbatas waktunya.

d. Kejelasan Dan Spesifikasi Program Input

Biasanya program memiliki tingkatan kejelasan. Secara ekstern terdapat program-program tersebar, variabel lebih banyak dan kadang-kadang sulit untuk digambarkan.

e. Kompleksitas Tujuan

Beberapa program dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secara singkat dan jelas, sementara yang lain dengan tujuan yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur.

f. Kebaruan Program

Program dikatakan inovatif bila program tersebut pada akhir pelaksanaannya mampu merubah secara karakteristik kebiasaan yang ada.

Model kesesuaian ini akan dapat berjalan dan berhasil seperti yang diharapkan, apabila di dalam proses pelaksanaan terhadap program Menurut Kuncoro memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a. Proses pencairan ADD, yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok sasaran dengan apa yang ditawarkan oleh program ini, dimaksudkan bahwa kelompok sasaran akan mendapatkan

manfaat dari apa yang ditawarkan oleh program, sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi.

- b. Pengalokasian ADD kesesuaian antara keputusan-keputusan organisasi pelaksana program dengan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan kelompok sasaran untuk meminta pelayanan program, ini mengacu pada realisasi pelayanan program bagi kelompok sasaran, seperti kegiatan PKK, pembinaan anak dan remaja, kegiatan gotong royong, belanja perlengkapan.
- c. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan berkesinambungan, dinamis, secara sinergis dan mendorong keterlibatan semua potensi, seperti partisipasi jaringan kerja dan keadilan. Program ADD merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa rejosari mataram sebagai implementasi program pemerintah yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, program ADD ini sebagai suatu program tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai.

Adapun tujuan program ADD, sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis program ADD, yaitu:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan masyarakat sesuai kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Program ADD merupakan paket kegiatan yang bertujuan membantu pemerintah desa, yang mempunyai prinsip pengelolaan sebagai berikut, yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.<sup>10</sup>

### **3. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa terdapat pada;1) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah

---

<sup>10</sup>[http://www.academia.edu/5218236/Jurnal\\_Alokasi\\_Dana\\_Desa](http://www.academia.edu/5218236/Jurnal_Alokasi_Dana_Desa)

daerah, pasal 212 ayat(3) mengenai keuangan desa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga

Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10 % setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>11</sup> Dibagi untuk setiap desa secara proposional merupakan alokasi dana desa. Sedangkan pengelolaan keuangan ADD diatur dalam peraturan pemerintah menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2015 pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 96 ayat (1) dan (2) pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima

---

<sup>11</sup>Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat 1 & 4.

kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>12</sup>

Pengelolaan ADD mengacu pada asas:

**a. Asas Merata**

Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)

**b. Asas Adil**

Asas adil adalah besarnya ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut alokasi dana desa proporsional. Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADD adalah 40% (empat puluh per persen) dari jumlah ADD.<sup>13</sup>

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>12</sup>A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), h. 58.

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 97 Ayat 2.

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- f. Mendorong peningkatan pemberdayaan dan gotongroyong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik kampung(BUMK).<sup>14</sup>

Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa bagian yang tak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.<sup>15</sup>

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima desa 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk biaya oprasional penyelenggaraan pemerintah

---

<sup>14</sup>Chabibsoleh, HeruRocmansjah, *Op.Cit.* h. 62.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 16.

desa dan BPD, sedangkan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dari 30% (tiga puluh per seratus) alokasi dana desa dipergunakan untuk oprasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD seperti: biaya oprasional desa, biaya oprasional BPD, biaya oprasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Dari 70% (tujuh puluh per seratus) dipergunakan untuk masyarakat seperti: pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan pengurus utama gender, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa. BUMK, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan pada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Limnas dan sebagainya.<sup>16</sup>

Sedangkan mekanisme pencairan dana penyaluran alokasi dana desa yaitu:

- a. Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama adalah dipertanggung jawabkan baik secara administratif, secara teknis dan dasar hukum.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,h. 16.

- d. Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1. Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ke kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan dana (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
  - 2. Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala desa.
  - 3. Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada Bank yang ditunjuk.
  - 4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam buku kas umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.<sup>17</sup>

### **C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

#### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan secara bahasa, aman, sentosa, dan makmur, .  
 Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, 165.



kemakmuran.<sup>18</sup> Kesejahteraan menurut ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.<sup>19</sup>

Menurut Kolle dalam bukunya bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.<sup>20</sup>

## 2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>W.J.S Purwadinata, *PengertianKesejahteraanManusia*, (Bandung: Mizan, 1996), 126.

<sup>19</sup>Undang-undang no 13 tahun 2003 TentangKetenagaKerjaan, Bab 1 KetentuanUmumPasal 1 Angka 31.

<sup>20</sup>Bintaro, *InteraksiDesa-Kota Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2989), h.54.

<sup>21</sup>Badrudin, Rudy, *EkonomiOtonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN 2021), h. 146.

Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.<sup>22</sup>

Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.<sup>23</sup>

Kesejahteraan sosial menurut UUD RI nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1: “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, tersier. Adapun spritual untuk memenuhi kewajiban beragama serta mencari arti dan tujuan hidup. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

---

<sup>22</sup>Sudarsono, *PengantarEkonomiMikro*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

<sup>23</sup>Todaro P Michael, Smith C Stphen, *Pembangunan Ekonomi Di DuniaKetiga*, Edisi Indonesia, PenerbitErlangga, Jakarta, 2003, h. 19.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

- (1) sosial ekonomi rumah tangga masyarakat,
- (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produktifitas rumah tangga atau masyarakat,
- (3) potensi regional (seperdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yng mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan
- (4) kondisi lembaga yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal regional dan global.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materi dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spritual.

### **3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator - indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah

ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam<sup>24</sup> Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

### **1. Bappenas**

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bapennas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumahtangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih randah.

### **2. Biro Pusat Statistik**

Menurut BPS ada 14 (empat belas) kriteria untuk menentukan keluarga dan rumahtangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500,00.- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang modal lainnya. Jika minimal 9

---

<sup>24</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi mikro Islam*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 10.

variabel terpenuhi maka dikatakan sebagai rumah tangga miskin tidak sejahtera.

Badan pusat statistik (BPS) menyebutkan tentang latar belakang informasi mengenai konsep dan istilah yang digunakan dalam statistik kesejahteraan sosial diantaranya adalah kondisi rumah tangga, luas lantai, daerah perkotaan atau pedesaan, probabilitas bayi mati sebelum mencapai usia 1 tahun keluhan masyarakat terdapat kesehatan, imunisasi, pasien rawat inap, status gizi, narapidana, aksi dan korban kejahatan, luas lantai, mendengarkan radio, membaca koran/surat kabar, serta menonton televisi. Dari beberapa devisi tentang indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

**a. Tingkat Pendapatan**

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan an kebutuhan lain yang bersifat material.

**b. Komposisi Pengeluaran Pengeluaran**

Pola kosumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini berkemabang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat

memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengidentifikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan kian lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan.

### **c. Pendidikan**

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintahan bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk memajukan sosial dan pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus di lestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-

norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya. Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa takwa kepada Allah yang maha esa. Meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan dan pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pada individu masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pendidikan sebagai lembaga konserfatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- (1) fungsi sosialisasi,
- (2) fungsi kontrol sosial,
- (3) fungsi pelestarian budaya,
- (4) fungsi reproduksi budaya,
- (8) fungsi difusi kultural,
- (9) fungsi peningkatan sosial, dan
- (10) fungsi modifikasi sosial.<sup>25</sup>

Menurut BPS pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

angka atau huruf, angket partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan semakin baik. Dan semakin rendah angka putus sekolah semakin baik dan keadaan suatu daerah dan sejahtera, karena distribusi bantuan pemerintah merata. Angka partisipasi

---

<sup>25</sup>Wujudji, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 1988), h. 31-42

sekolah merupakan ukuran sumber daya sistem pendidikan terhadap usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan pendudukan terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Sehingga, nilai presentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usai sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya insfrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

#### **d. Kesehatan**

Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi kesehatan menurut BPS:

- Keluhan kesehatan
- Proses kelahiran
- Kelahiran
- Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan
- Imunisasi
- ASI
- Mengobati sendiri
- Obat tradisional



- Berobat jalan
- Tidak termasuk dalam berobat jalan
- Rawat inap

**e. Perumahan**

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut BPS:

- Bangunan Fisik
- Status Penguasaan Rumah

Dari pemikiran-pemikiran diatas maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan mampu membawa korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu pertumbuhan pembangunan harus fokus pada seluruh aset bangsa. Hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian kerja berkembang.

**4. Faktor pendorong pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Faktor Pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:

a) Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah Sekitar Desa rejosari mataram

Pemerintah Kabupaten lampung tengaah telah mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Buku pedoman tersebut kini menjadi

acuan Pemerintah Desa rejosari mataram di dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten lampung tengah peduli terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayahnya.

b) Kualitas Sumber Daya Manusia

Aparat Pemerintah Desa Rejosari Mataram memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa. Selain itu, aparat Desa rejosari mataram juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas tugas yang diembannya.

c) masyarakat ikut menyumbangkan idea atau pemikiran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan (Abu Rahum) 1633

d) Masyarakat ikut bergotong royong dalam kegiatan pengelolaan ADD yang ada di Desa Krayan Makmur Faktor Penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalam pembangunan fisik desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser : Dari hasil penelitian, bahwa faktor terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa rejosari mataram adalah Rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa sehingga dapat memperlambat berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Hal itu terbukti dari permasalahan yang ada di Desa rejosari mataram membuat terhambatnya suatu pembangunan.

## **5. Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa (ADD)**

### **a) Faktor Penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan Pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa rejosari mataram telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di Desa rejosari yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat desa.

### **b) Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)**

Sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas berdasarkan pernyataan dari aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap belum mencukupi juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa rejosari mataram ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

### **c) Kurangnya intensitas sosialisasi**

Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat Berdasarkan pernyataan dari beberapa warga Desa rejosari mataram yang

mengungkapkan ketidaktahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat minim. Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman warga akan Alokasi Dana Desa (ADD) maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

#### **6. Kiat-Kiat Mencapai Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibutuhkan program-program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah Program ADD, program ini adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Berikut beberapa langkah yang di tempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat.

#### **D. Ekonomi Islam**

##### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti ekonomi Islam. Beberapa ekonom muslim berusaha mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga terkesan terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi Islam.

Adapun definisi-definisi tersebut antara lain:

- a. Muhammad bin Abdullah Al Arabi dalam At Tariqi (2004), menurutnya ekonomi Islam adalah “kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur‘an dan sunah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.
- b. Muhammad Abdul Mannan (1993) mendefinisikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.
- c. Metwally (1995), menurutnya ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur‘an dan Sunah Nabi SAW, *ijma*, dan *qiyas*.

- d. Muhammad Syauki Al Fanjari dalam At Tariqi (2004), bahwa ekonomi Islam adalah sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.
- e. Abdullah Abdul Husain at Tariqi (2004), mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara mengembangkan harta<sup>26</sup>.

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al - Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

*Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini bukan membuat kerusakan dengan sumber daya alam yang ada. Jadi Ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

---

<sup>26</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Airlangga, 2012), h. 7.

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Qur'an juga memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam itu sendiri. Al-Qur'an memberi hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan kesetabilan dalam perekonomian itu sendiri<sup>27</sup>. Dan hal ini tertuang pada( Qs saba :24)

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ ۚ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

24. Katakanlah: "Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan Sesungguhnya Kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.(Qs saba 24)<sup>28</sup>

Dari ayat di atas telah Allah jelaskan bahwa sesungguhnya rezeki yang manusia nikmati adalah limpahan nikmat dari Allah SWT. Allah memberikannya dari sunnatullah yang Allah tetapkan di langit dan bumi. Sesungguhnya kemakmuran ekonomi manusia di muka bumi tidak akan pernah terjadi jika tanpa adanya bantuan dan ketetapan dari Allah SWT.

<sup>27</sup>HukumEkonomi Islam, (On-Line) tersedia di: <http://www.islamcendekia.com/2014/02/hukum-ekonomi-islam-dalam-sumber-hukum-al-quran.html> (18 Juli 2017)

<sup>28</sup>Depertemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 228.

Hal ini dapat kita hayati dari hal-hal berikut ini:

- a. Manusia tidak akan bisa panen jika tanpa ada keteraturan musim hujan dan musim panas yang Allah tetapkan
- b. Manusia tidak akan bisa memakan dan meminum sesuai kebutuhannya jika Allah tidak menurunkan sunnatullah di alam raya ini
- c. Manusia bisa melaksanakan bisnisnya dengan bahan baku yang didapat dari ciptaan Allah, tidak ada yang bisa manusia buat kecuali hanya mengkreasikan
- d. Perputaran uang dan harta manusia tidak akan abadi, sedangkan rezeki yang Allah nilai bukan hanya harta melainkan kesehatan, kasih sayang, dsb

Hal-hal diatas menunjukkan bahwa dasar ekonomi islam adalah ketundukkan dan ketaatan kepada Allah SWT pelaksanaan nilai, Rukun Islam, Dasar Hukum Islam, Fungsi Iman Kepada Allah SWT, Sumber Syariat Islam, dan Rukun Iman. Ekonomi islam didasarkan pada ketauhidan. Seluruh aktivitas ekonomi umat manusia di muka bumi ini tidak akan bisa dilakukan jika Allah tidak menetapkan Sunnatullahnya.<sup>29</sup>

### **3. Pengertian Sistem Ekonomi Islam**

Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul pada satu kelompok saja,

---

<sup>29</sup><https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/dasar-ekonomi-islam>



tapi tersebar keseluruh masyarakat.<sup>30</sup> Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat untuk membangun sistem Ekonomi Islam sesuai dengan nilai-nilai budaya yang bersangkutan. Setiap masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi dan mereka harus memiliki sistem yang mampu mengontrol dan memecahkan masalah ekonomi tersebut, ini sangat diperlukan karena satu masyarakat berbeda dengan masyarakat yang lainnya.

Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jualbeli, pinjam meminjam maupun investasi (Al-Qasas: 77)

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qasas: 77)<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 11.

<sup>31</sup> Depertemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 228.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul pada satu kelompok saja, tapi tersebar keseluruh masyarakat<sup>32</sup>. Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat untuk membangun sistem ekonomi Islam sesuai dengan nilai-nilai budaya yang bersangkutan. setiap masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi dan mereka harus memiliki sistem yang mampu mengontrol dan memecahkan masalah ekonomi tersebut, ini sangat diperlukan karena satu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya.

#### **4. Nilai-Nilai, Prinsip, dan Tujuan dalam Sistem Ekonomi Islam**

Secara khusus, nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syari'at. bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni<sup>33</sup>:

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-nahl ayat 90:

---

<sup>32</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 11.

<sup>33</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit*, h. 62.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan berbuat adil dalam melaksanakan segala aspek kehidupan serta berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara Hak dan Kewajiban mereka.

2. Pertanggung jawaban, Menurut Sugeng Istanto, pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Pertanggung jawaban negara dibatasi pada pertanggung jawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional saja. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggung jawaban. Misalnya perbuatan negara menolak seorang warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah

negaranya<sup>34</sup> untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok tertentu saja.

3. *Tafakul* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dan bekerja sama.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Allah telah menjanjikan kepada manusia untuk memberikan imbalan yang lebih ketika telah ditunaikannya tanggung jawab sosial. Dalam ayat lain juga Allah juga telah melarang bagi manusia yang

---

<sup>34</sup>F, SoegengIstanto, 1994, HukumInternasional, Yogyakarta: PenerbitanUAJYogyakarta hlm.77

menimbun harta kekayaan, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial diantara mereka.

Kewajiban bekerja tersebut menjadi tanggung jawab laki-laki dewasa yang mampu saja. Adapun perempuan, tidak diwajibkan bekerja, meski syara' tidak mengharamkannya bekerja. Nafkah bagi perempuan menjadi kewajiban suaminya, atau ayahnya jika perempuan itu belum menikah. Nafkah anak-anak, menjadi kewajiban ayahnya. Nafkah ayah dan ibu yang sudah tua, menjadi kewajiban anak laki-lakinya yang sudah dewasa dan mampu, jika ayah dan ibu membutuhkan nafkah

## 5. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi Islam

Prinsip dan tujuan dalam sistem Ekonomi Islam, juga bersumber pada ajaran syar'ī yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi:

- a. *Tauhid*, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus penuh dengan tanggung Jawab<sup>35</sup>.
- b. *Khalifah*, kesadaran sebagai wakil Allah dimukabumu melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syar'ī, berekonomi

---

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 65.

semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini mengutamakan kemakmuran kelompok, orang-perorang atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun.

Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun karangka ekonomi Islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas. Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syari'ah. Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan.

Tujuan syari'ah akan menjiwai manusia untuk bertindak baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Keimanan terletak pada urutan pertama tak lain karena keimanan akan memberikan cara pandang terhadap dunia yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seseorang. Seperti misalnya: perilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Sikap mental tersebut, secara ekonomi akan mempengaruhi sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan material dan cara pemenuhan kebutuhannya<sup>36</sup>.

Menurut Abdul Manan (1993), landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep *Fundamental*, yaitu keimanan kepada Allah SWT (*tauhid*), kepemimpinan (*Khalifah*), dan keadilan (*adalah*). *Tauhid* adalah konsep yang

---

<sup>36</sup><sub>41</sub>*Ibid*, h. 67.

paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan aktivitas baik yang mencakup ibadah (*abudilah*) *mahdah* (berkait sholat, dzikir dan sebagainya), termasuk ekonomi (*mu'amalah*), *muasyarah*, hingga *akhlak*<sup>37</sup>.

Ekonomi yaitu bagian dari *muamalah* secara umum dalam konsep islam harus memperhatikan prinsip *tauhid*, *khalifah* dan keadilan (*adalah*), yang harus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera *al-falah*<sup>38</sup>.

Ekonomi Islam memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya-sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemasalahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat<sup>39</sup>.

Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk memecahkan persoalan penting yang dihadapi suatu sistem ekonomi. Tak terkecuali masalah ADD yang merupakan salah satu sasaran kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam alokasi dana desa, sehingga tercipta keadilan sosial di masyarakat secara luas.

---

<sup>37</sup>Lukman Hakim, *Op.Cit*, h. 4

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 6.

<sup>39</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit*, h. 53.

## E. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Kesejahteraan (*Falah*) dalam Ekonomi Islam

*Al-falah* secara bahasa diambil dari kata dasar *falah* yang bermakna *zharafa bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *al-falah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

artinya "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,".<sup>40</sup>

Rasulullah SAW bersabda: Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid berkata, Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid dari Abu Al Khair dari Abdullah bin 'Amru; Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Islam manakah yang paling baik?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal". (H.R. Bukhari)<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Prof. Dr. Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah *al-falah* berarti : kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi (*komprehensif*) dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-qur'an dan Sunnah.

---

<sup>40</sup>Depertemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 342.

<sup>41</sup>Imam Bukhari, *KitapShahihBukhari*, h. 15.



Dari pengertian di atas, maka *falah* bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik lahir dan batin, yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesungkan, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Anbiyya“ ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.*<sup>42</sup>

Dari isi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungannya dengan Allah misalnya (*habl min Allah wa habl min an-nas*).Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal shaleh, yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi khalifah yang dilakukan nabi Adam As. Kesejahteraan sosial didambakan AL-Qur“an tercermin disurga yang dihuni

---

<sup>42</sup>Depertemen agama RI, *Op.Cit*, h. 331.

oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Masyarakat yang mewujudkan bayangan-bayangan surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, dan bahkan lingkungan. Hal ini sesuai kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam.<sup>43</sup>

Ayat tersebut jelas bahwa sandang, pangan, dan papan yang di istilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan ini merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan Masyarakat.

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atau usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor- faktor produksi yang dimiliki. Jika Faktor-faktor produksi tersebut di manfaaatkan secara optimal maka pendaptan masyarakat dapat di tingkatkan.

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi utama menurut AL-Qur'an adalah alam dan kerja manusia produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia.<sup>44</sup> Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari: Perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan Kesuburan aspek-aspek akidah

---

<sup>43</sup>M. QuraishShihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Iatas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 127.

<sup>44</sup>Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana) h. 109.

dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat seimbang. Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw, melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain. kemudian lahir dari keluarga itu Abu Bakar Ash-Sidik r.a dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian seterusnya. Sehingga pada akhirnya terbentuknya masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan masyarakat:

- a. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak mungkin jiwa akan merasa ketenangan apabila kepribadian terpecah.
- b. kesadaran bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, sekali usaha maksimal adalah pilihan terbaik yang selalu mengandung hikmah, karena itu Allah memerintahkan kepada manusia berusaha semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepadanya,
- c. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya, dan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan istrinya baik dari segi jasmani maupun rohani. Tentunya tanggungjawab ini mengandung konsekuensi keuangan dan pendidikan.
- d. menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk menghadapi masa depan, sebagian lain (yang tidak mereka nafkahkan itu) mereka tabung untuk menciptakan rasa aman menghadapi masa depan, diri, dan keluarga.

- e. Kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, serta masyarakat terhadap pribadi. Kewajiban tersebut sebagaimana halnya setiap kewajiban melahirkan hak-hak tertentu yang sifatnya adalah keserasian dan keseimbangan diantara keduanya. Sekali lagi kewajiban dan hak tersebut tidak terbatas pada bentuk penerimaan maupun penyerahan harta benda. Tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan.

Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggotanya yang berpotensi. Setiap insan harus memperoleh perlindungan, jiwa, harta, dan kehormatannya. Jangankan membunuh, mengejek dengan sindiran halus, atau sebutan yang tidak senonoh, berprasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari kesalahan, dan sebagainya. Semuanya dilarang dengan tegas, karena semua itu dapat menimbulkan rasa takut tidak aman, maupun kecemasan yang mengantarkan kepada tidak terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang didambakan.<sup>45</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material; seperti terpenuhinya kebutuhan spritual, terpeliharannya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera itu terpenuhinya dua kriteria: pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Kedua, terjaga

---

<sup>45</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomimikro Islam*, ( Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2011), h. 129-133.

dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan dapat di kendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sodakoh, dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti: sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi secara kesinambungan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.

## **2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidak nyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.<sup>46</sup>

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;
2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat;
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;

---

<sup>46</sup>*Ibid*, 2-1.

5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat perwujudan tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggungjawab bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Berlandaskan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islami, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi Syariah. Hal itu terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan, adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu mampu

mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.

Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>47</sup>

Tujuan ekonomi Islam menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Sebagai tatanan ekonomi, Islam menganjurkan manusia bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha dilakukan oleh manusia diletakkan Allah pada timbangan kebaikan menurut teori Islam, kehidupan-kehidupan terbagi menjadi dua unsur materi dan spritual yang satu sama lain saling membutuhkan antara lain:

### **1. Unsur Materi**

Kenikmatan yang disediakan Allah di bumi berupa rizki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan dunia ini secara wajar, islam memperbolehkan manusia memanfaatkan nikmat dunia dan batas-batas yang dihalal-Nya dan yang menjauhi yang haram. AL-Qur‘an dan hadist menyebutkan sejumlah kehidupan yang baik, beberapa kenikmatan dalam kehidupan

Nikmat makanan dan minuman yang terdiri dari kelezatan daging, buah, susu, madu, air dan lain-lain.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, h. 10.

- a. Nikmat pakaian dan perhiasan.
- b. Nikmat tempat tinggal.
- c. Nikmat kendaraan.
- d. Nikmat rumah tangga.

## 2. Unsur Spiritual

Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan terletak dikedamaian, kelapangan dada, dan ketenangan hati, jika manusia menginginkan kebahagiaan, maka sesungguhnya, ia tidak akan memperoleh dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.<sup>48</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hud ayat 61:

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾

61. Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Maksud dari ayat ini adalah manusia yang di percaya Allah sebagai khalifah itu bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan

<sup>48</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2000), h.



konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan (Allah). Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam Al-Qur'an adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah.

Maksud dari *manusia sebagai pemakmur bumi* adalah; karena manusia itu diciptakan dari tanah yang diambil dari bumi, maka sepatutnya manusia yang bahan utamanya adalah tanah untuk menjaga dan memakmurkannya, sebagai tanda penghargaan atas asal-usul penciptaan mereka. Dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, manusia harus mampu menjaga amanah yang diberikan Allah kepada mereka dalam hal-hal yang menyebabkan bumi itu tetap terjaga dan makmur. Sebaliknya, jika manusia itu dengan kekuasaannya merusak dan menyalah gunakan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya, maka secara tidak langsung manusia itu telah menghina asal-usul dari mana mereka diciptakan (tanah). Allah SWT memperhatikan eksistensi manusia di muka bumi, setelah memperoleh cukup pengetahuan maka Allah SWT menempatkan manusia sebagai eksistensi yang kreatif, sebagaimana termaktub dalam surat Hud ayat 61 "*Dan Dia yang menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menugaskan kamu untuk memakmurkan.*"

Atas dasar surat huud 61 ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Manusia yang

dibina adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan immaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan. Dengan penggabungan unsur-unsur tersebut, terciptalah makhluk dwidimensi dalam satu keseimbangan, dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Dasar pemikiran di atas tentu saja menuntut umat manusia untuk menempatkan aspek penguasaan ilmu pengetahuan menjadi penting. Pendidikan dalam hal ini, tidak saja menjadi rekomendasi Islam yang bersifat normatif-doktriner, tetapi juga menjadi investasi bagi umat manusia untuk menentukan masa depannya, baik jangka pendek (dunia) maupun jangka panjang (akhirat).

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Seputih Mataram**

Perjuangan pemerintah Republik Indonesia, Desa/Kampung Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah didirikan semenjak dibuka oleh Pemerintah melalui Dinas Transmigrasi Tahun 1961. Sejak Tahun 1961 hingga sekarang, warga masyarakat dan Pemerintah Kampung terus berkembang, berbenah diri dan membangun mengikuti Perkembangan Pembangunan Pemerintah.

Masyarakat membangun Kampung Rejosari Mataram sangat majemuk sejak pengangkatan dan penempatan oleh Jawa Transmigrasi ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ada yang dari pulau Bali. Masyarakat Kampung Rejosari Mataram sangat menghargai dan menghormati keragaman, mereka bias hidup berdampingan, bergotong royong tanpa membedakan suku, agama, dan adat-istiadat. Warga masyarakat Kampung Rejosari Mataram semangat, kompak, rukun, bersatu, dan bertanggung jawab sejak tahun 1961. Sampai sekarang belum terjadi perselisihan warga karena beda suku, agama dan adat-istiadat.

Sarana umum seperti Balai Kampung, Kantor Pemerintah Kampung, dan khususnya Jalan Kampung tingkat Kota adalah merupakan sarana kebutuhan pokok yang sangat menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, khususnya Kampung Rejosari Mataram.

## **2. Kondisi Geografis Kecamatan seputih mataram**

Kecamatan rejosari mataram lampung tengah salah satu kecamatan yang terdiri dari 9 desa .dengan batas wilayah sebagai berikut:

Denah Wilayah Kampung

- SebelahUtara: Kampung Sumber Agung
- SebelahTimur: Way Seputih, Seputih Raman
- SebelahSelatan: Kampung Pajar Mataram
- SebelahBarat: Kampung Kurnia Mataram

## **3. Kondisi Demografis**

### **a. JumlahPenduduk**

Jumlah penduduk di Kecamatan seputih mataram terdiri dari 5075(lima puluh ribu tujuh puluh lima) jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1755(seribu tujuh ratus lima puluh lima) KK yang terdiri dari 2323 (dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga) laki-laki dan 2754(dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat) perempuan. Adapun desa yang termasuk di Kecamatan seputih mataram yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Presentase Penduduk Desa Rejosari Mataram**

NO	DUSUN	KK	WARNA NEGARA		ORANG		JUMLAH
			RI		ASING		
			L	P	L	P	
1	REJO KATON	133	331	334	-	-	665
2	REJO BASUKI	155	200	250	-	-	450
3	REJO MUKTI	187	250	300	-	-	550
4	REJO AGUNG	145	200	225	-	-	425
5	REJO MURNI	277	300	450	-	-	750
6	REJO MULYO	220	300	350	-	-	650
7	REJO BINANGUN	187	292	260	-	-	550
8	REJO ASRI	186	250	300	-	-	550
9	REJO MAKMUR	165	200	285	-	-	485
JUMLAH		1755					5075

Sumber: Data Primer di olah tahun 2018

Presentase penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 48,18% (empat puluh delapan koma delapan belas persen) dan berjenis kelamin perempuan 51,82% (lima puluh satu koma delapan dua persen), hampir setara meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel

3.2 dibawah ini yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	2323	48,185%
2	perempuan	2754	51,82%
<b>Jumlah</b>		<b>5075</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer di olah tahun 2018

b. Penduduk berdasarkan agama

Penduduk berdasarkan agama di desa rejosari mataram dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Presentase Sesuai Agama**

No	Agama	Presentase
1	Islam	495 jiwa
2	Kristen	15 jiwa
3	Khatolik	12 jiwa
4	Hindu	72 jiwa

Sumber : Data Primer di olah tahun 2018

Dilihat dari data di atas Agama Islam 495 jiwa, Kristen 15 jiwa, Khatolik 12 jiwa, Hindu 72 jiwa.

Berdasarkan keagamaan mayoritas penduduk kecamatan rejosari mataram beragama Islam, adapun fasilitas atau tempat ibadah berdasarkan agama atau keyakinan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Fasilitas Tempat Ibadah**

No	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	8 unit
2	Musholla	10 unit
3	Pure	0
4	Greja	0
5	Wihara	0

Sumber: Data Primer di olah tahun 2018

## c. Lembaga pendidikan

Dikecamatan rejosari mataram memiliki lembaga pendidikan dari tingkat TK, SD, SMK.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan**

No	Lembaga Pendidikan	Unit
1	TK	1
2	SD	3
3	SMK	1
Jumlah		5

Sumber : Data Primer di olah tahun 2018

1. TK ummi rejosari mataram
2. SD N 1 rejosari mataram
3. SD N2 rejosari mataram
4. SD N 3 rejosari mataram
5. SMK N pangudi luhur

## d. Sarana Kesehatan

Di desa rejosari mataram mempunyai sarana kesehatan :

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Sarana Kesehatan**

NO	Jenis Prasarana	UNIT
1	Puskesmas	1 unit
2	Posyandu	5 unit
Jumlah		6 unit

Sumber: Data Primer di olah tahun 2018

## e. Kondisi Perumahan

Data kondisi rumah di Kecamatan rejosari mataram Sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Persentase Kondisi Rumah Masyarakat**

<b>Klasifikasi</b>	<b>Jumlah</b>
Permanen	60%
Semi permanen	27%
Non permanen	13%

Sumber: Data Primer di olah tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi rumah masyarakat rejosari mataram, lampung tengah terdiri dari 3 klasifikasi yaitu rumah permanen, semi permanen, dan non permanen. Rumah permanen yaitu rumah yang memiliki ciri dinding bangunannya dari tembok, berlantai semen atau kramik, dan atapnya berbahan genteng. Sedangkan rumah semi permanen yaitu rumah yang memiliki ciri dindingnya setengah tembok atau setengah bambu, lantainya semen, atapnya terbuat dari genteng seng ataupun asbes. Rumah non permanen memiliki ciri rumah berdinding kayu, bambu atau gedek, dan tidak berlantai (tanah), atas rumahnya dari seng maupun asbes. Kondisi rumah masyarakat di desa rejosari mataram terdiri dari rumah permanen sebesar 60% (enam puluh per seratus), semi permanen sebesar 27% (dua puluh tujuh per seratus) dan rumah non permanen sebesar 13% (tiga belas per seratus).



f. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan rejosari mataram lampung tengah di dominasi pada sektor pertanian 91,5% (sembilan puluh satu koma lima persen), buruh tidak tetap 3% (tiga persen), PNS 1% (satu persen), karyawan 1% (satu persen), buruh perusahaan 1% (satu persen), pedagang 2% (dua persen), wiraswasta 0,5% (enol koma lima) . Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan rejosari mataram adalah petani belum di manfaatkan secara optimal membuat produksi pertanian belum meningkat.

Sedangkan masyarakat yang menjadi buruh tani hanya mendapat penghasilan perhari antara Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)-Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Dibiidang ekonomi, masih sedikitnya lembaga perekonomian di wilayah Kecamatan rejosari mataram yang terkait seperti: perdagangan, jasa dan industri kecil, atau UMKM, yang kurangnya kegiatan pembinaan kepada masyarakat. Perlunya upaya dalam usaha-usaha untuk jasa, perdagangan, industri kecil dan menengah di hadapkan dan dikembangkan lebih lanjut untuk menggerakan roda perekonomian khususnya dikecamatan rejosari mataram. Lebih jelasnya dapat dilihat kondisi perekonomian masyarakat pada tabel 3.8

**Tabel 3.8**  
**Presentase Jenis Pekerjaan**

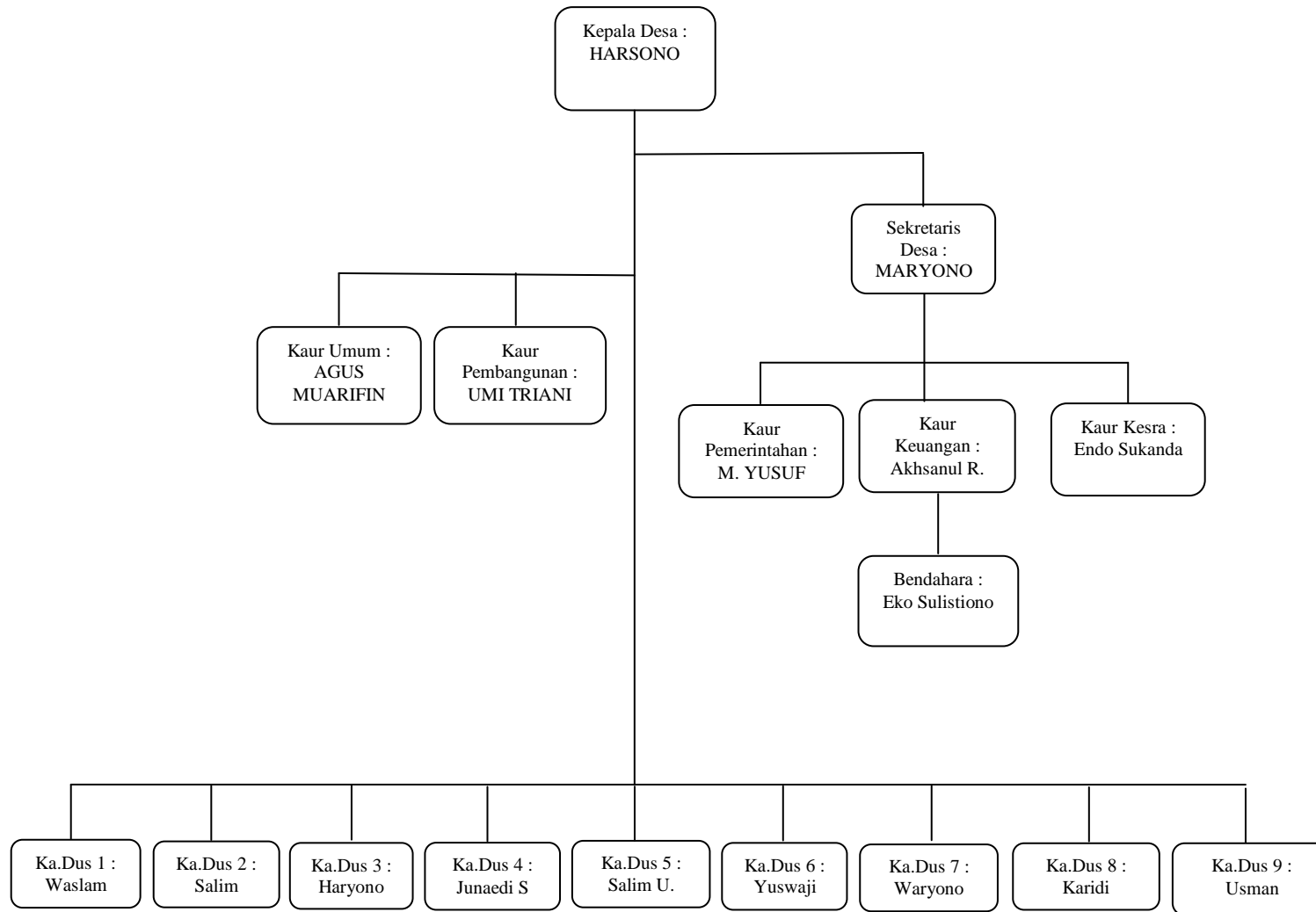
No	Jenis Pekerjaan	Presentase
1	Tani	91,5%
2	Buruh tidak tetap	3%
3	PNS	1%
4	Karyawan	1%
5	Buruh perusahaan	1%
6	Pedagang	2%
7	Wiraswasta	0,5%

Sumber: Data Primer di olah tahun 2018

#### **4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Rejosari Mataram**

Dalam setiap pemerintahan yang baik, harus ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab, agar setiap tugas baik pemimpin maupun pekerja dapat mengetahui dengan jelas yang menjadi tugasnya. Dengan adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga terjadi koordinasi antara petugas satu dengan yang lainnya akan terlaksana dengan baik. Penentuan tugas dan tanggung jawab ini dapat diketahui melalui struktur organisasi.

Tabel 3.9

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA REJOSARI MATARAM**

## **5. Kondisi Masyarakat di Desa Rejosari Mataram**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapainya kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat rejosari mataram lampung tengah.

### **a. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat di peroleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Masyarakat rejosari mataram jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, bahkan ada juga yang melanjutkan kejenjang SMA, dan strata satu (S1). Tetapi hampir dari masyarakat rejosari mataram berpendidikan SMA. Faktor anak sekolah dikarenakan para orang tua tidak menganjurkan dan juga tidak ada keinginan dari anak untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, mereka hanya cepat-cepat mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga.

**Tabel 3.10**  
**Tingkat pendidikan masyarakat 2017**

No	Keterangan	Presentase
1	Penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf	1%
2	Penduduk tidak tamat SD/sedrajat	3%
3	Penduduk tamat SD/sedrajat	20%
4	Penduduk tamat SMP/sedrajat	25%
5	Penduduk tamat SMA/sedrajat	44%
6	Penduduk tamat D-3	4%
7	Penduduk tamat S-1	2%
8	Penduduk tamat S-2	1%
Total		100%

Sumber: Data Primer di olah tahun 2018

Tingginya warga yang berlatar belakang SMA atau sederajat, membuat pengetahuan masyarakat mengetahui pentingnya pendidikan. Akan tetapi berpenghasilan rendah membuat warga takut untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Warga yang berpendidikan S1 diantaranya adalah anak-anak yang memiliki perkebunan luas, kebun karet, sawit dan sawah, PNS didinas pendidikan atau guru SD.

#### **b. Tingkat Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia antara nagara dalam *Humen Devolepmentn Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari : indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).

Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi:

- 1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum perkiraan kalori dan protein yaitu 2100kk11/hari.
- 2) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
- 3) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter dan perawat.

Untuk indikator kesehatan, indikator yang mewakili dalam IPM adalah umur harapan hidup waktu lahir. namun bila ditanya lebih lanjut, bagaimana cara meningkatkan umur hidup, sulit dijawab dengan pasti. Oleh karena itu tampaknya diperlukan serangkaian indikator kesehatan lain yang diperkirakan berdampak pada kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan umur harapan hidup waktu lahir.

**Tabel 3.11**  
**Tingkat Kesehatan Masyarakat**

No	Indikator	Presentase
1	Angka kematian bayi	2%
2	Angka kematian ibu	0%
3	Angka harapan hidup	4%
4	Presentase persalinan oleh tangan medis	94%

Sumber: Data Primer di olah tahun 2018

Tabel diatas menunjukan bahwa meningkatnya taraf kesehatan masyarakat rejosari mataram. Hal ini ditegaskan oleh seorang tokoh

masyarakat yang menjelaskan bahwa tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan kekurangan cukup gizi atau kematian bayi dan ibu hamil, hal ini disebabkan hampir seluruh masyarakat rejosari mataram dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi. Dalam proses kelahiran penduduk rejosari mataram sudah sedikit menggunakan tabib (dukun bayi), penduduk sudah beralih ke bidan, dan mudahnya akses jalan menuju puskesmas atau puskesmasdes, masyarakat yang sudah mengikuti kemajuan zaman serta mudahnya mengakses jaringan internet untuk mengetahui informasi tentang kesehatan.

#### **c. Tingkat Pendapatan Masyarakat**

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari kepala rumah tangga ataupun pendapatan anggota rumah tangga. penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan seperti: pangan, kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun pendidikan serta kebutuhan lainnya yang bersifat material.

Masyarakat rejosari mataram mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dikarenakan di kecamatan seputih mataram memiliki lahan yang luas serta tanah yang subur untuk bercocok tanam, sebagian besar masyarakat menanam kacang sebagai sumber pendapatan. Adapun besaran pendapatan masyarakat rejosari mataram menurut profesi sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Jenis profesi dan jumlah pendapatan**

No	Jenis Profesi	Pendapatan Perbulan
1	Petani	Rp.1.100.00-Rp.2.000.000
2	Buruh	Rp.600.000-Rp.1.600.000
3	Pedagang	Rp.600.000-Rp.2.000.000

Sumber: Data Primer di olah tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa kenaikan pendapatan penduduk di desa rejosari mataram tidak mengalami Peningkatan yang besar, ini menunjukan alokasi dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat di desa rejosari mataram, kurang baik dalam pembuatan program dan pengelolaannya.

Contoh sample pengelolaan alokasi dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat

#### **d. Komposisi Pengeluaran Masyarakat**

Pengeluaran dilakukan untuk kebutuhan hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi pada umumnya dibelanjakan untuk kebutuhn-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan barang utama untuk kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai barang konsumsi (termasuk sadang, perumahan bahan bakar, dan sebagainya), yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung kepada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.



Hasil kesimpulan wawancara penulis dengan kepala desa di desa rejosari mataram, seputih mataram lampung tengah , kebutuhan konsumsi setiap hari tidak selalu sama. Penghasilan tidak menentu menjadi salah satu factor berapa porsi pengeluaran perharinya. Jika pendapatan masyarakat tinggi maka konsumsi masyarakat akan tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan masyarakat sedikit maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran untuk konsumsi berkisar Rp. 30.000 (tigapuluhribu rupiah) perhari. Ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan, pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan sebagainya.

Menurut perhatian biro pusat statistik konsumsi masyarakat meliputi seluruh pengeluaran rumah tangga baik makanan, pendidikan, kesehatan maupun perumahan. Berikut ini merupakan tabel pola konsumsi masyarakat rejosari mataram.

**Tabel 3.13**  
**Pola Konsumsi Tahun 2017**

No	Pola Konsumsi	Pengeluaran Perbulan
1	Pengeluaran makan	Rp.800.000
2	Pengeluaran pendidikan	Rp.500.000
3	Pengeluaran kesehatan	Rp.200.000
Total pengeluaran		Rp.1.500.000

Sumber: Data Primer di olah tahun 2018

Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran konsumsi makanan masih lebih besar dibandingkan konsumsi perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sehingga masyarakat rejosari mataram harus mencari pekerjaan tambahan untuk meningkatkan pendapatan.

#### **e. Tingkat Perumahan Masyarakat**

Menurut WHO, rumah atau struktur fisik bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Sedangkan perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik, misalnya penyediaan air bersih, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Permukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya, perumahan memberi kesan tentang rumah beserta sarana lingkungannya.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perumahan merupakan suatu lingkungan untuk tempat tinggal, struktur fisik, atau bangunan untuk berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial maupun politik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

**Tabel 3.14**  
**Tingkat Perumahan Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Jenis profesi</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
1	Kepemilikan Rumah	Hak milik	Hak milik	Hak milik
2	Jumlah Rumah Per/KK	8.053	8.056	8.080
3	Rumah Berkualitas Baik	55%	60%	70%
4	Rumah Tangga Memiliki Penerangan Listrik	80%	87%	95%
5	Rumah yang Mempunyai MCK yang baik	50%	58%	67%

Sumber: Data Primer di olah tahun 2017

Dari tabel diatas jelas menunjukan bahwa program alokasi dana desa berdampak positif jika dilihat dari jumlah rumah berkualitas baik dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami kenaikan yaitu naik sebesar 15%, sedangkan jika dilihat dari tingkat penerangan listrik dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami naik sebesar 15%, tetapi belum berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari fasilitas MCK yang belum cukup memadai.

#### **B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rejosari Mataram**

Pengelolaan alokasi dana desa rejosari mataram ini dikelola langsung oleh aparaturnya, kepala desa sebagai penanggung jawab program, sedangkan sekretaris desa sebagai ketua pelaksanaan program. Dalam hal ini pada tahun 2016 ADD yang di pergunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp.40.001.000,00 (empat puluh juta seribu rupiah) sisanya di pergunakan untuk biaya perawatan kampung dan di bidang infrastruktur, sedangkan ADD tahun 2017 yang di pergunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp.156.620.000,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sisanya di pergunakan untuk biaya

perawatan kampung dan di bidang infrastruktur untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan program serta pengelolaan di masing-masing dusun :

a. Desa Rejosari Mataram

Luas wilayah di desa rejosari mataram 770Ha (tujuh ratus tujuh puluh) Ha, dengan kepala desa bapak Harsono, terdiri dari 9 (sembilan) dusun dan 24 (dua puluh empat) RT, jumlah penduduk 5.065 (lima ribu enam puluh lima) jiwa, dan 1.755 (seribu lima ratus lima puluh lima) KK. Desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 880.188.800,00 (delapan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Proses penentuan program ADD di desa rejosari mataram ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, dan pada tahun 2016 ini dusun yang akan mengelola ADD ini adalah dusun 6,7,8,9 jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk ke rekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membina Surat Perintah Pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk membiayai program-program yaitu:

**Tabel 3.15**  
**Pembagian Dana ADD 2016**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah kampung	Rp.252.594.800,00
2	Pelaksanaa pembangunan kampung	Rp.578.852.000,00
3	Bidang pembinaan masyarakat	Rp.25.541.000,00
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp.23.201.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp.880.188.800,00

Sumber data: Data Primer di olah tahun 2016

Dana dana desa di bagi menjadi beberapa bidang yaitu :

**Tabel 3.16**  
**Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>
1	Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp.151.620.000,00
2	Oprasional prkantpran barang+jasa	Rp.40.193.500,00
3	Belanja modal	Rp.31.350.000,00
4	Operasional BPK	Rp.1.184.800,00
5	Oprasional RT	Rp.23.838.300,00
6	Oprasional LPMK	Rp.1.415.200,00
7	Oprasional linmas	Rp.1.287.200,00
8	Oprasional kepala dusun	Rp.1.705.800,00
<b>Jumlah</b>		Rp. 252.594.800,00

Sumber data: Data Primer di olah tahun 2016

**Tabel 3.17**  
**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>
1	Pembangunan jalan underlaghdusun 6,7,8,9(2000mx3m)	Rp.401.377.000,00
2	Pembangunan gorong-gorong uk.5x1,5x0,8m(5unit)	Rp.52.708.000,00
3	Pembangunan gorong-gorong plat uk.5x1x6m(10buah)	Rp.79.767.000,00
4	Pembuatan pos siskamling 9 unit	Rp.45.000.000,00
5	Belanja modal	Rp.34.308.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.578.852.000,00</b>

Sumber data: Data Primer di olah tahun 2016

**Tabel 3.18**  
**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>
1	Kegiatan kapasitas kader posyandu	Rp.16.800.000,00
2	Kegiatan pembinaan RT	Rp.1.485.000
3	Kegiatan pembinaan pemuda karang taruna	Rp.4.775.000,00
4	Pembinaan ketertiban dan keamanan	Rp.2.481.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. .25.541.000,00</b>

Sumber data: Data Primer di olah tahun 2016

**Tabel 3.19**  
**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

No	Uraian	Satuan
1	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana	Rp.8.177.000,00
2	Pengadaan buku perpustakaan kampung	Rp.15.024.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp.23.201.000,00

Sumber data: Data Primer di olah tahun 2016

**Tabel 3.20**  
**Data ADD TAHUN 2017**

NO	URAIAN	SATUAN
1	Penyelenggaraan pemerintah kampung	Rp.362.871.400,00
2	Bidang pembangunan	Rp.689.871.500,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp.45.495.300,00
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp.160.945.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp.1.259.183.200,00

Sumber data: Data Primer di olah tahun 2017

Dapat kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah kampung dapat di bagi beberapa bidang yaitu :

**Tabel 3.21**  
**Data Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Nominal</b>
1	Hasil tetap dan tunjangan	Rp.163.800.000,00
2	Oprasional perkantoran	Rp.6.626.400,00
3	Kebersihan kampung	Rp.16.500.000,00
4	Pemeliharaan balai kampung	Rp.9.933.250
5	Pemereliharaan kantor sekertariat PKK	Rp.6.796.500,00
6	Pemeliharaan gedung posyandu	Rp.11.346.250,00
7	Pemeliharaan kendaraan dinas kampung	Rp.1.500.000,00
8	Paud	Rp.5.000.000,00
9	Honorarium+konsumsi rapat	Rp.16.400.000,00
10	Pengadaan peralatan kantor	Rp.27.452.000,00
11	Peralatan elektronik kantor	Rp.1.210.000,00
12	Oprasional rt	Rp.38.380.000,00
13	Oprasional LINMAS	Rp.24.880.000,00
14	Oprasional LPMK	Rp.1.100.000,00
15	Oprasional BPK	Rp.2.860.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp. 362.871.400,00

Sumber data: data primer di olah tahun 2017

**Tabel 3.22**  
**Bidang Pembangunan**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>
1	Pembangunan jalan(lapen)3x2000x3m	Rp.507,810.00.00
2	Pembangunan jalan telprt dusun4(200mx2,5m)	Rp.39,085,000.00
3	Pembangunan gorong-gorong plat5mx1mx0,6m=2unit)	Rp.21,250,750.00
4	Pembangunan gorong-gorong plat(5x1,5x0,8m=3unit)	Rp. 32,989,750.00
5	Pembangunan jembatan 5x(4x2,90m)1unit	Rp.88,736,000.00
<b>Jumlah</b>		Rp.689.871.500,00

*Sumber data: data primer di olah tahun 2017*



**Tabel 3.23**  
**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>
1	Kegiatan pembinaan PKK	Rp.3.850.000,00
2	Pembinaan pemuda dan karang taruna	Rp.3.320.000,00
3	Peningkatan kapasitas kader posyandu	Rp.17.470.000
4	Pembinaan aparaturnya kampung	Rp.3.277.600
5	Pelatihan paralegal	Rp.13.500.000
6	Pembinaan keamanan/LINMAS	Rp.4.127.700
<b>Jumlah</b>		Rp.45.495.300,00

Sumber data: data primer di olah tahun 2017

**Tabel 3.24**  
**Pemberdayaan Masyarakat**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>
1	Lomba senam ibu-ibu PKK	Rp.3.700.000
2	Kegiatan karang taruna turnamen antar dusun	Rp.13.7400.000
3	Kegiatan pembinaan keagamaan	Rp.6.380.000
4	BUMK rejo makmur	Rp.124.000.000
5	Pelatihan pengurus	Rp.8.800.000
<b>Jumlah</b>		Rp.160.945.000,00

Sumber data: data primer di olah tahun 2017

Contoh sample pengelolaan alokasi dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat peternakan sapi .

**Tabel 3.25**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jenis usaha BUMK</b>
1	Harsono	Petani	Ternak sapi
2	Agus muarifin	Petahi	Ternak sapi
3	Maryono	Pedagang	Ternak sapi
4	m.yusuf	Petani	Ternak sapi
5	Akhsanul R	Pedagang	Ternak sapi
6	Endo sukanda	Buruh	Ternak sapi
7	Eko sulistiono	Buruh	Ternak sapi
8	Waslan	Pedagang	Ternak sapi
9	Salim	Petani	Ternak sapi
10	Haryono	Petani	Ternak sapi
11	Junaidi	Petani	Ternak sapi
12	Marsani	Petani	Ternak sapi
13	Salim u	Guru ngaji	Ternak sapi
14	Yuswaji	Petani	Ternak sapi
15	Waryono	Petani	Ternak sapi
16	Karidi	Buruh	Ternak sapi
17	Usman	Buruh	Ternak sapi

Sumber data: data primer di olah tahun 2017

**Tabel 3.26**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jenis usaha</b>
1	Maryati	IRT	Sale pisang
2	Sri wahyuni	Guru SD	Sale pisang
3	Samini	pedagang	Sale pisang
4	Endang yuliarsih	IRT	Sale pisang
5	Derita kiswan	IRT	Sale pisang
6	Supami	Guru paud	Sale pisang
7	Mustanginah	Buruh	Sale pisang
8	Romlah	Buruh	Sale pisang
9	Juniarti	IRT	Sale pisang
10	Darmi	IRT	Sale pisang
11	Susi	Pedagang	Sale pisang
12	Dewi handayani	Pedagang	Sale pisang
13	Zubaidah	IRT	Sale pisang
14	Dwi meylani	Bidan	Sale pisang
15	Haryati	IRT	Sale pisang

Sumber data: data primer di olah tahun 2017

Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari Dana Desa (DD). Disamping DD yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari

APBD, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), Hibah Pihak Ketiga, serta Pendapatan lain-lain yang Sah.

Keuangan Desa termasuk didalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21/2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 jo. PP No.47/2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat Desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat Desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun.

Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, karena Pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Pengelolaan ADD 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus dan di bagi untuk setiap desa secara propesional.

Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

Ada beberapa langkah dalam pengelolaan ADD agar mencapai kesejahteraan masyarakat :

##### **1. Perencanaan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Rejosari

Mataram dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan ,jalan, pembangunan sarana puskesmas, perbaikan pagar, membuat sumur bor, perbaikan sarana dan prasarana, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Rejosari Mataram yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## 2. Pelaksanaan

Dilihat dari hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram yang sudah sesuai dengan tahap

perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana puskesmas, perbaikan pagar, membuat sumur bor, perbaikan sarana dan prasarana, dan lain lain, yang seharusnya dilakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang ada didesa. Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram adalah sudah dilakukannya dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di Desa Rejosari Mataram , apa lagi dalam hal pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh sopir pengangkut material dikarenakan minimnya pengawasan yang dillakukan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK), sehingga di harapkan Tim TPK dapat lebih mengoptimalkan dalam hal pengawasan agar tidak terdapat kecurangan- kecurangan yang dapat merugikan Desa Rejosari Mataram.



**Tabel 4.1**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis usaha BUMK</b>
1	Harsono	Ternak Sapi
2	Agus muarifin	Ternak Sapi
3	Maryono	Ternak Sapi
4	M.Yusuf	Ternak Sapi
5	Akhsanul R	Ternak Sapi
6	Endo sukanda	Ternak Sapi
7	Eko sulistiono	Ternak Sapi
8	Waslan	Ternak Sapi
9	Salim	Ternak Sapi
10	Haryono	Ternak Sapi
11	Junaidi	Ternak Sapi
12	Marsani	Ternak Sapi
13	Salim u	Ternak Sapi
14	Yuswaji	Ternak Sapi
15	Waryono	Ternak Sapi
16	Karidi	Ternak Sapi
17	Usman	Ternak Sapi

Sumber data: data primer di olah tahun 2017

**Tabel.4.2**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Usaha</b>
1	Maryati	Sale Pisang
2	Sri wahyuni	Sale Pisang
3	Samini	Sale Pisang
4	Endang yuliarsih	Sale Pisang
5	Derita kiswan	Sale Pisang
6	Supami	Sale Pisang
7	Mustanginah	Sale Pisang
8	Romlah	Sale Pisang
9	Juniarti	Sale Pisang
10	Darmi	Sale Pisang
11	Susi	Sale Pisang
12	Dewi handayani	Sale Pisang
13	Zubaidah	Sale Pisang
14	Dwi meylani	Sale Pisang
15	Haryati	Sale Pisang

Sumber data: data primer di olah tahun 2017

### 3. Penataan usaha

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sesuai dengan PP 43 2014 tentang Pemerintah Desa Penataan usaha pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah

desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Dan kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat, Untuk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa rejosari mataram yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa. Bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa, untuk pembangunan fisik Desa rejosari mataram demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai Apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian akan hal itu.

#### 4. Laporan dan Pertanggung Jawaban

Berdasarkan hasil penelitian Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa. Dilihat dari penelitian pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa rejosari mataram yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.

Pengelolaan ADD mengacu pada asas:

- a. Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
- b. Asas adil adalah besarnya alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan), selanjutnya disebut alokasi dana propesional. Besarnya presentase perbandingan atas asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besaran ADDP adalah 40 % (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

Dari data yang di kumpulkan oleh penulis di ketahui bahwa besaran alokasi dana desa rejosari mataram di setiap desanya tahun 2017 berkisar antara Rp.880.188.963,00(delapan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)sampang dengan Rp.1.259.196.148,00(satu milyardua ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) per tahun, sudah termasuk anggaran untuk aperatur desa, yang diberikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan.

Pengelolaan untuk penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Rejosari Mataram yaitu untuk pembangunan, gorong-gorong, pembangunan tugu, perbaikan jalan kampung , untuk bantuan oprasional lembaga kemasyarakatan kegiatan pembinaan kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial

budaya masyarakat, kelompok tani, belanja pegawai, biaya musyawarah, kegiatan PKK, LPM dan sisanya untuk operasional desa yaitu alat tulis, perlengkapan kantor lainnya, dan hanya ada 4 dusun dari 9 dusun yang programnya untuk pemberdayaan ekonomi yaitu dusun Rejo Mulyo, Rejo Binangun, Rejo Asri, Rejo Makmur, namun belum terlaksana dengan baik.

Pengelolaan ADD di Kecamatan Rejosari Mataram ini pengalokasian dana desa masing-masing desa hanya berfokus pada pembangunan balai desa jalan desa dan gorong-gorong dan tunjangan untuk aperatur desa, sedangkan prasarana yang lain belum tersentuh seperti pembangunan *sanitasi* (prilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih), yang lebih dibutuhkan masyarakat belum ditangani dengan baik walaupun sudah ada di dusun 9 yaitu dusun Rejo Makmur yang membangun wadah air bersih, tetapi itu pun masih sangat jauh dari kata mencukupi untuk kebutuhan masyarakat karena terkendala dengan dana ADD yang minim.

Selain terkendala dengan dana ADD yang kurang, dana yang diperoleh hanya di fokuskan untuk operasional desa, belanja aperatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini untuk belanja aperatur desa sebesar 60% dan untuk kegiatan ekonomi hanya terlihat dari persentasi penggunaan alokasi dana desa antara 35%-45%, seperti desa rejosari mataram 40%.

Dan diantara 9 dusun di Kecamatan Rejosari Mataram yang paling baik diantara desa yang lain yaitu dusun Rejo Makmur, karena selain baik secara administratif maupun pengelolaan di lapangan, baik pula dalam pembagian alokasi dana desa untuk masing-masing pos, seperti pembangunan fisik,

bantuan lembaga masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun oprasional desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Yang memiliki program pemberdayaan masyarakat yaitu di 5 dusun yaitu: Dusun Rejo Katon, Rejo Basuki, Rejo Mukti, Rejo Agung, Rejo Murni, sedangkan di 4 dusun yaitu: Rejo Mulyo, Rejo Binangun, Rejo Asri, Rejo Makmur, ADD hanya digunakan untuk pembangunan fisik, belanja oprasional desa dan BPD. Sedangkan berdasarkan UU no 6 tahun 2014 pasal 78, tujuan dari program ADD adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastrutur desa.
- 4) Meningkatkan pengamalan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong toyong masyarakat.
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang di adakan dan di susun oleh pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak sebagai indikator-indikatornya yaitu: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan masyarakat yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam program ADD. Maka berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat dari tabel 4.3 dibawah ini:

**Tabel 4.3****Indikator Kesejahteraan Sebelum ada ADD dan Sesudah ada ADD**

<b>Indikator</b>	<b>Sebelum ada ADD</b>	<b>Sudah ada ADD tahun</b>	<b>Keterangan</b>
Tingkat Pendidikan	50%	60%	mengalami peningkatan
Tingkat Kesehatan	Persalinan tangan medis 85%	95%	mengalami peningkatan
Tingkat Pendapatan Masyarakat	Rp.1.000.000 - 1.500.000	Rp.1.000.000 - 1.800.000	Mengalami peningkatan
Pengeluaran Masyarakat	Rp. 800.000	Rp. 800.000	Tidak mengalami peningkatan
Tingkat Perumahan	60%	75%	Ada peningkatan 15%
Infrastruktur gorong - gorong	45 %	90%	Mengalami peningkatan 45%

Sumber: data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

### **1. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan



dengantujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan tidak memerlukan bantuan orang lain.

Masyarakat Rejosari Mataram jika ditinjau dari latarbelakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar sembilan tahun, bahkan ada masyarakat yang meneruskan kejenjang SMA, dan S1. Tetapi hampir 50% masyarakat rejosari mataram berpendidikan SMA. Dampak adanya program ADD di rejosari mataram pada bidang pendidikan belum dapat di rasakan oleh masyarakat sekitar, dikarenakan pengalokasian dana tersebut belum dialokasikan ke pendidikan.

Sekalipun program ADD tersebut belum dirasakan langsung oleh masyarakat namun tidak menjadikan masyarakat putus sekolah karena adanya bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu yang diberikan oleh pemerintah.

## **2. Tingkat Kesehatan**

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen kesejahteraan yaitu terpenuhinya pangan, sandang, dan kesehatan sehari-hari.

Dari program alokasi dana desa untuk kesehatan yaitu pembuatan gorong-gorong dan sanitasi air bersih yang dilakukan di dusun Rejo Katon, Rejo Basuki, Rejo Mukti, Rejo Agung, Rejo Murni, Rejo Mulyo, Rejo Binangun, Rejo Asri, Rejo Makmur, di desa Rejosari Mataram dengan pembuatan gorong-gorong tersebut sanitasi kesehatan akan lebih sehat dan telah mensejahterakan masyarakat di tingkat kesehatan.

Masyarakat Rejosari Mataram dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi, hal ini terlihat dari kecukupan akan makan yang di konsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga Masyarakat Desa Rejosari Mataram dalam penanganan ibu melahirkan sudah sangat sedikit menggunakan tabib atau dukun bayi, sehingga angka kematian dan ibu melahirkan tidak ada. Masyarakat Desa Rejosari Mataram yang memiliki masalah kesehatan lebih memilih berobat ke puskesmas, puskesmas dan bidan. Serta pola makanan dan kebutuhan kalori juga terpenuhi dengan baik sehingga jarang ada warga yang sakit karena kekurangan asupan makanan.

### **3. Tingkat Pendapatan**

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang bersal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Menurut Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang (SKPMP) 2017 tingkat pendapatan perbulan dikatan sejahtera adalah lebih dari Rp.500.000. Adanya ADD ini tidak memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, ini karena program ADD serta pengelolaan di desa rejosari mataram kurang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat, di desa rejosari mataram ini yang menggunakan untuk kegiatan pemberdayaan yaitu Dusun Rejo Katon, Rejo Basuki, Rejo Mukti, Rejo Agung, Rejo Murni, Rejo Mulyo, Rejo Binangun, Rejo Asri, Rejo Makmur, yang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa kelompok tani, kerajinan tangan

oleh ibu PKK namun pengelolaanya belum dikelola dengan baik sehingga secara ekonomi belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Seharusnya dari program ADD digunakan untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pembuatan industri rumah tangga kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **4. Komposisi Pengeluaran**

Pola konsumsi rumahtangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makan pada seluruh pengeluaran rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa rumah tangga sejahtera bila presentase pengeluaran makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan prerentase pengeluaran untuk non makanan atau <80% dari pendapatan. Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu karena masyarakat di desa rejosari mataram mayoritas petani yang mengandalkan musim panen. Namun jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka semakin sedikit, maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran konsumsi berkisar Rp.20.000-30.000 perhari. Ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatanperumahan serta pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

## 5. Tingkat Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m<sup>2</sup> dan bagian terluas rumah bukan tanah, dan status pengusaan tempat tinggal milik sendiri.

Bentuk bangunan rumah masyarakat desa rejosari mataram sebesar 60% permanen, 27% semi permanen atau masih berbentuk rumah adat, 13% adalah dalam keadaan non permanen, dan seluruh status kepemilikan adalah milik sendiri. Sedangkan MCK warga juga 60% yang memiliki sanitasi yang baik selebihnya hanya MCK seadanya. Kondisi sumber air bersih juga kurang sekalipun sudah ada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tetapi masih belum mencukupi kebutuhan warga, ini terlihat dari pasokan air mengalir untuk warga setiap kampung berbeda-beda. Keadaan penerangan 90% warga sudah menggunakan listrik, dan sekitar 10% warga belum memiliki KWH sendiri. Apabila dilihat dari indikator perumahan, warga belum dikatakan sejahtera karena luas bangunan belum memenuhi kategori sejahtera. Beberapa indikator yang telah dijelaskan, telah menunjukkan bahwa ADD berdampak positif bagi masyarakat sekitar seperti tidak harus menggunakan air sungai lagi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sekalipun belum dapat memenuhi 100% kebutuhan air bersih. Jika dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, beberapa indikator kesejahteraan ini belum terpenuhi dengan baik, oleh program alokasi dana desa di desa rejosari mataram, hanya indikator tingkat kesehatan yang mengalami peningkatan cukup baik dari program alokasi dana desa ini seperti sudah ada program untuk saluran sanitasi

dan pembuatan gorong-gorong sehingga masalah saluran sanitasi menjadi lebih baik dan lebih sehat. Dan tingkat pendidikan masyarakat belum terlihat dampak positif dari program alokasi dana desa, karena program yang berhubungan dengan pendidikan belum menyentuh masyarakat, sekalipun tingkat pendidikan masyarakat desa rejosari mataram hampir 50% yang lulus SMA bahkan ada yang sampai keperguruan tinggi. Itu bukan karena program yang ada di desa rejosari mataram namun karena batuan Pendidikan di yang digalakan oleh Kabupaten lampung tengah. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendapatan masih belum dapat dikatakan sejahtera, olah karena itu peran pengelolaan alokasi dana desa yang tepat sangat di nantikan oleh masyarakat demi perubahan kondisi ekonomi sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi jika dilihat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rejosari Mataram , tujuan alokasi dana desa ini belum tersentuh secara menyeluruh. Dari tujuan ADD yang baru dirasakan oleh masyarakat yaitu pembangunan insfrastruktur desa, dan peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial, ini terlihat dari program-program di desa yang di alokasikan untuk ibu-ibu PKK yang digunakan untuk pengajian seperti dusun Rejo Katon, Rejo Basuki, Rejo Mukti, Rejo Agung, Rejo Murni. Untuk pembangunan infrastrukturnya yaitu Rejo Mulyo, Rejo Binangun, Rejo Asri, Rejo Makmur.. Peningkatan pendapatan desanya yaitu Rejo Katon (Dusun 1) dan Rejo Makmur (Dusun 9).

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa tujuan dari program alokasi dana desa di Kecamatan Rejosari Mataram ini yang dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan insfrastruktur, dan peningkatan pengamalan nilai-nilai kegaamaan sosial budaya. Sedangkan peningkatan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, karena terkendalanya dana yang kurang dan ketidak sesuaian program yang di susun oleh pemerintahan desa setempat. Aperatur desa belum memprioritaskan kegiatan ekonomi produktif sebagai salah satu program dari alokasi dana desa, aperatur desa lebih memprioritaskan pembangunan gorong-gorong, jalan, dan sinitasi air bersih yang sangat kurang sehingga itu menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

## **B. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**

1. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram Kec.Seputih Mataram Lampung Tengah : Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut ikut serta dalam perencanaan, dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar desa Rejosari Mataram, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan dan pertanggung jawaban untuk diberikannya ide/pemikiran dan tenaga yang sangat berpengaruh dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram menjadi lebih baik.

a. Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah Sekitar Desa Rejosari Mataram

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Buku pedoman tersebut kini menjadi acuan Pemerintah Desa rejosari mataram di dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah peduli terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayahnya.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Aparat Pemerintah Desa Rejosari Mataram memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa. Selain itu, aparat Desa Rejosari Mataram juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas tugas yang diembannya.

c. masyarakat ikut menyumbangkan idea atau pemikiran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan (Abu Rahum) 1633

d. Masyarakat ikut bergotong royong dalam kegiatan pengelolaan ADD yang ada di Desa Krayan Makmur Faktor Penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalam pembangunan fisik desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser : Dari hasil penelitian, bahwa faktor terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram adalah Rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa sehingga dapat

memperlambat berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Hal itu terbukti dari permasalahan yang ada di Desa Rejosari Mataram

membuat terhambatnya suatu pembangunan.

2. Faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Faktor Penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalam pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram :

- a. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan Pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rejosari Mataram telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di Desa rejosari yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat desa.

- b. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)

Sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas berdasarkan pernyataan dari aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa



Rejosari Mataram ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

c. Kurangnya intensitas sosialisasi

Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat Berdasarkan pernyataan dari beberapa warga Desa Rejosari Mataram yang mengungkapkan ketidak tahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat minim. Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman warga akan Alokasi Dana Desa (ADD) maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

Dari hasil penelitian, bahwa faktor terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa rejosari mataram adalah Rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa sehingga dapat memperlambat berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Hal itu terbukti dari permasalahan yang ada di Desa Krayan Makmur membuat terhambatnya suatu pembangunan.

### C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rejosari Mataram Menurut Persepektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu pun dengan perencanaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. Ar-Ra'd:11):

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ

دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Artinya, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga hamba Allah secara bergiliran, ada yang di malam hari, ada pula yang di siang hari untuk menjaganya dari hal-hal yang buruk dan kecelakaan-kecelakaan. Sebagaimana bergiliran pula kepadanya malaikat-malaikat lainnya yang bertugas mencatat semua amal baik dan amal buruknya; mereka menjaganya secara bergiliran, ada yang di malam hari, ada yang di siang hari yaitu di sebelah kanan dan sebelah kirinya - bertugas mencatat semua amal perbuatan hamba yang bersangkutan. Malaikat yang ada di sebelah kanannya mencatat amal-amal

baiknya, sedangkan yang ada di sebelah kirinya mencatat amal-amal buruknya.

Selain dari itu ada dua malaikat lain lagi yang bertugas menjaga dan memeliharanya; yang satu ada di belakangnya, yang lain ada di depan. Dengan demikian, seorang hamba dijaga oleh empat malaikat di siang harinya, dan empat malaikat lagi di malam harinya secara bergantian, yaitu malaikat yang menjaga dan yang mencatat,

Pengelolaan dan dampak alokasi dana desa 2017 di Kecamatan rejosari mataram dalam perspektif Ekonomi Islam tidak sesuai dengan QS. Ar-Ra`d ayat 11. Serta tidak menggunakan asas adil dalam pembagain porporisi ADD 2017 di Kecamatan Rejosari Mataram karena terkendala dengan dana ADD yang minim. Selain terkendala dengan dana ADD yang kurang, dana yang diperoleh hanya di fokuskan pembangunan fisik, untuk oprasional desa, Belanja Aperatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini untuk belanja aperatur desa sebesar 60% dan untuk kegiatan ekonomi hanya terlihat dari persentasi penggunaan alokasi dana desa antara 35% - 45%, seperti Desa Rejosari Mataram 40%. Selain terkendala dengan dana ADD, dana yang diperoleh hanya di fokuskan pembangunan gorong-gorong yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan masyarakat di Rejosari Mataram. Namun ada beberapa desa yang mengalokasikan dengan baik yaitu Dusun Rejo Katon, dan Rejo Makmur.

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengolahan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-masing desa. Pada pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Rejosari Mataram ini ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya dikarenakan pembagian proporsi untuk masing-masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif yaitu Dusun Rejo Basuki, Rejo Mukti, Rejo Agung, Rejo Murni, Rejo Mulyo, Rejo Binangun, Dan Rejo Asri, sedangkan desa yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Dusun Rejo Katon Dan Dusun Rejo Makmur. Di Desa Rejosari Mataram ini pengelolaan yang paling baik yaitu dusun Rejo Makmur itu terlihat dari proporsi pembagian ADD untuk masing-masing pos seperti untuk pembangunan fisik, bantuan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ataupun untuk oprasional kampung sudah sesuai dengan peraturan sebagaimana mestinya.

2. Faktor pendorong dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram adalah Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah Sekitar , Kualitas Sumber Daya Manusia, partisipasi masyarakat sangat mendukung kegiatan ini dengan dilakukannya secara bergotong royong untuk memajukan perkembangan desa yang lebih maju.

Sementara itu faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram adalah Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan, Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Kurangnya intensitas sosialisasi, rendahnya tingkat pendidikan atau Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga kurang optimalnya pembangunan.

3. Pelaksanaan dan dampak program alokasi dana desa tahun 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram dalam perspektif Ekonomi Islam belum sesuai dengan QS. Ar-Ra‘d ayat 11. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa, kurangnya pendidikan masyarakat, sikap apatisnya masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat, kurang transparanya dalam pengelolaan ADD Serta belum menggunakan asas adil dalam pembagain porporsi ADD 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram, karena terkendala dengan dana ADD tahun 2016 dan 2017 yang minim. Selain terkendala dengan dana ADD, dana yang diperoleh hanya di fokuskan pembangunan gorong-gorong yang

masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Rejosari Mataram. Namun ada beberapa dusun yang mengalokasikan dengan baik yaitu Dusun Rejo Katon dan Rejo Makmur.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diajukan beberapa hal yang diharapkan bisa diterapkan yaitu:

1. Untuk pemerintah ataupun Instansi terkait memperhatikan pelatihan pengelolaan keuangan untuk aparatur desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang diharapkan kedepannya dalam pengelolaan keuangan dana Desa bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan. Untuk pemerintah desa seharusnya program Alokasi Dana Desa lebih mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan terfokus pada operasional desa dan benar – benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Dengan menerapkan prinsip memiliki tanggung jawab sosial untuk berperilaku ekonomi yang adil dan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan untuk meningkatkan pendapatan secara umum bukan pendapatan secara pribadi atau kelompok tertentu saja. Diharapkan kedepan pemimpin – pemimpin bangsa ini lebih baik lagi dalam memikul beban berat yang di amanah kan masyarakat terhadap dirinya agar tercapai kemaslahatn umat (falah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2015.
- Sugiyono, metode penelitian administrasi,(bandung:alfabeta,2003)
- Mudrajat kuncoro, metode riset untuk bisnis dan ekonomi, erlangga,jakarta,2003.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2015.
- Hasan,iqbal,analisis data penelitian dengan statistic,(jakarta:bumi aksara,2004).
- M.iqbal hasan,bpokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya.( Jakarta: Ghalia indonesia.2002)
- Sugiyono,metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D,(bandung:alfabeta,2014).
- Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek,edisi revisi,v cetakan, keduabelas, jakarta, 2002.
- Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, ( Jakarta; Bumi Aksara), 2012.
- P.joko subagyo.metode penelitian dalam teori & praktik (jakarta:pt asdi mahasatya.cetakan keenam.2011).
- Suharsimi arikunto,prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (jakarta: rineka cipta,2006).
- Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jumanatun Ali-ART, 2004).
- Suharman, Harry. 2006. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan: Pengaruh Alat Evaluatif-Anggaran, Anggaran Partisipatif, Volume III*. Bandung: PAAP UNPAD.

- D. Arifiyanto, *et al.* 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. International Journal of Education, Universitas Pendidikan Indonesia. Vol. 2, No. 3, December 2014.
- Herry, 2012. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta : Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2011
- Hoesada, J. 2014. *Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)*. Jakarta.
- Sadeli, Lili M. 2015. *Dasar-dasar Akuntansi*. PT. Buni Aksara, Jakarta.
- Suwarjeni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka baru Press, Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Ni Kadek Darmiasih, *et al.* 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa (Studi kasus Desa Tri Buana, Kec. Sideman, Kab. Karangasem)*. E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 1 No:3 Tahun 2015.
- Thomas, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. eJournal Universitas Mulawarman, 2013, 1(1): 51-64.
- Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Seti, 2013)
- Meleong, Lexy L. *metodologi penelitian kualitatif*, (bandung, remaja rosdakarya, 2001).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004).
- Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2012)
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015)
- Rosinawati, *et al.* 2015. *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif*



*Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Tahun 2015.

Rosalinda Okta, *et al.* 2014. *pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan (Studi Kasus :Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*

Prasetyaningtyas Feni Yudanti, *et al.* 2015. *analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa karang luhur kabupaten wonosobo*, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2015.

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

Prabawa, Akbar, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Didesa Loa Lepu Kecamatan Tenggarongseberang Kutai Karta Negara”. Jurnal Ilmu Pemeritah, (Desember 2015).